

2022

**KAJIAN RASIONALISASI TARGET INDIKATOR
KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Disusun Oleh :
**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Berkerjasama Dengan:
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG



KAJIAN RASIONALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

TIM PENYUSUN:

HADI SUSILO, S.STP, M.Si
Drs. ADRI, M.Si
AHMAD HIDAYAT, S.STP, M.Sc
RUDI ANWAR, ST
MARDONI, SE, M.Si
BENNY ROKMANSYAH. A, S.Pt
DONNY TAYES, SKM, M.Si
DEDI JUNAEDI, SAP
RIFTOMI, ST
ANDI ASMARA, S.T
NOFENDRI, S.Si, M.Si, M.I.L
FERA EZA SAFITRI, S.E, M.Si
SOVIA DEWI, S.E, M.Si
LUCYA LIDYA SARI, S.P
SURYATMONO, S.Si
HARRISON TAR, S.Pi, M.Si
ABDUL HAMID, SP
WERY ESRA VELNI, SE, Ak
FEBRIADI, SS
YULITA BUSRALI, SE.,MM
DEASY ITRAVIA, SE
HANIFAH ASZA, S.P.W.K

TIM ASISTENSI:

Prof. Dr. Ir. MELINDA NOER, M.Sc
YUERLITA, S.Si., M.Si., Ph. D



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt, atas berkat rahmat dan karunia Nya dokumen Kajian Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten pesisir selatan dapat diselesaikan. Kajian ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan (capaian) implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar untuk rasionalisasi penetapan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahap IV yang akan berakhir dalam 3 tahun yang akan datang. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan tahap IV berakhir bersamaan dengan berakhirnya implementasi Pelaksanaan RPJPD 2005 - 2025.

Dengan selesainya dokumen kajian rasionalisasi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pembangunan tahunan untuk periode 2023-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

diharapkan akan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan tahap berikutnya bagi pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah tahun yang akan datang. Saran dan kritik membangun demi kesempurnaan hasil kajian dan melengkapi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD kedepan sangatlah diharapkan.

Kepada Tenaga Ahli dari Universitas Andalas ibu Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc. dan ibu Yuerlita, S.Si., M.Si., Ph. D diucapkan terimakasih atas bantuan dan fasilitasnya dalam diskusi selama penyusunan dokumen evaluasi ini. Semoga dokumen ini bermanfaat dalam merencanakan kemajuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di masa datang.

Painan, 12 Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Luaran	4
1.5. Manfaat	4
II. KERANGKA INDIKATOR KINERJA	5
III. METODA	8
3.1. Pendekatan	8
3.2. Tahapan	9
3.3. Lingkup Kegiatan	9
IV. HASIL REVIEW	11
4.1. Hasil Review Dokumen RPJMD 2021-2026	11
4.2. Review Kerangka Pendanaan	14
4.3. Review Indikator Kinerja Utama	19
4.4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah - RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan	24
4.5. Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021-2026	74
V. PENUTUP	80
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Review Dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan...	11
2. Hasil review kerangka pendanaan Terhadap RPJMD 2021-2026 Kab. Pessel	14
3. Rasionalisasi Pendapatan Daerah RPJMD Tahun 2021-2026 Kab. Pessel	16
4. Rasionalisasi Belanja Daerah RPJMD Tahun 2021-2026 Kab. Pessel...	17
5. Rasionalisasi Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	18
6. Hasil Review Penggunaan Indikator Kinerja.....	20
7. Analisis IKU Daerah.....	24
8. Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review	30
9. Analisis Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	42
10. Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review sebagai Indikator Kinerja OPD.....	51
11. Rasionalisasi Target kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review	65

DAFTAR GAMBAR**Gambar****Halaman**

1. Hirarki Indikator Kinerja Pembangunan.....	7
2. Hubungan logis yang dibangun dalam Cascading Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026	15

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan lebih baik secara terarah dan terencana secara konseptual dengan memperhatikan lingkungan dan kondisi daerah dimana rencana pembangunan akan diimplementasi. Rencana pembangunan dibuat dalam bentuk dokumen agar dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana pembangunan (organisasi pelaksana daerah) dan mengukur rencana dengan realisasi sesuai standard dan indikator yang ditetapkan. Wujud dokumen rencana sesuai dengan periode perencanaan pembangunan yaitu, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD). Tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah terwujudnya pembangunan manusia melalui pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dengan indikator yang jelas dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 telah menyusun RPJMD 2021-2026 dan menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar hukum. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka Visi dan Misi dari kepala daerah terpilih perlu dituangkan ke dalam dokumen RPJMD berupa program dan kegiatan dengan strategi dan kebijakan yang jelas untuk mendukung program dan kegiatan agar terlaksana dengan baik sesuai tujuan pembangunan jangka menengah yang ditetapkan. RPJMD kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah RPJMD terakhir dalam periode RPJPD 2005-2025, sehingga RPJMD ini menentukan keberhasilan tujuan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan 20 tahun yang lalu.

Keberhasilan capaian pembangunan daerah yang direncanakan dan dituangkan sebagai sebuah ketetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah memerlukan indikator kinerja untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Indikator kinerja daerah tersebut adalah Indikator

Kinerja Utama (IKU). Selain IKU, ada indikator lain sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), yakni indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pemerintah pelaksana pada akhir periode masa jabatan kepala daerah.

Selain itu, penyusunan dan implementasi RPJMD 2021-2026 berada dalam periode pengendalian bencana virus yang tiba-tiba mengancam kesehatan manusia yakni pandemi virus covid-19. Akibatnya, perencanaan pembangunan disusun dalam kondisi yang tidak stabil dan penggunaan sumberdaya pembangunan lebih banyak digunakan untuk program dan kegiatan penanggulangan korban, mengantisipasi gejala serangan, dan meminimalisir penyebaran virus covid19. Secara nasional, setiap daerah diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran (*refocussing*) pembiayaan pembangunan untuk segera menyelesaikan masalah akibat pandemic virus covid-19. Masalah yang diakibatkannya bukan hanya mengganggu kesehatan manusia saja, tetapi juga berdampak kepada aktivitas usaha ekonomi masyarakat, ekonomi pembangunan daerah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan, karena masyarakat tidak lagi boleh berkumpul dan membuat keramaian dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Diberlakukan aturan Pembatasan Sementara Pergerakan Bersama (PSPB) secara nasional di setiap daerah, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan dengan itu, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditinjau ulang melalui kegiatan review RPJMD ini. Sebagai RPJMD tahap akhir dari RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan, maka RPJMD 2021-2026 tentu sangat menentukan terwujudnya rencana jangka panjang dan menjadi dasar untuk penyusunan tahapan jangka panjang pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

1.2. Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk melakukan asesmen terhadap dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan rasionalisasi standar dan target IKU pembangunan daerah

supaya waktu yang tersisa (tahun 2023-2026) untuk pencapaian target akhir RPJMD 2021-2026 dapat terwujud. Rincian tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Melakukan asesmen umum terhadap dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan secara materi Bab per Bab
- b. Mengukur dan menganalisis capaian (keberhasilan) kebijakan/program/kegiatan berupa lima puluh dua IKU RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan,
- c. Menilai relevansi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator pembangunan daerah dan kinerja pemerintahan daerah kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Melakukan penyesuaian target IKU tahun 2023-2026 untuk terwujudnya capaian target RPJMD sesuai target RPJPD 2005-2026.
- e. Melakukan penyesuaian kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan selama periode RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.

1.4. Luaran

Hasil kegiatan ini adalah dokumen berupa hasil review dan rekomendasi berupa rasionalisasi standar dan target Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2022 sesuai capaian yang telah terlaksana tahun 2021 dan 2022.

1.5. Manfaat

Sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2030 Kabupaten Pesisir Selatan.

II. KERANGKA INDIKATOR KINERJA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah adalah kinerja instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Permenpan RI, 2007). Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai secara rasional (*Achievable*), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (*Relevant*), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (*Time bound*), yang disingkat dengan dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

- a. *Specific/Spesifik (S)*; indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir)
- b. *Measurable/Terukur (M)*; dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas)
- c. *Achievable (A)*; dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada di dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- d. *Result-Oriented/Relevant (R)*; terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- e. *Time-Bound (T)*; memperhitungkan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menilai capaian indikator, dilakukan evaluasi yang fokus utamanya adalah perencanaan yang transparan dan akuntabel, disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana sekurang-kurangnya meliputi;

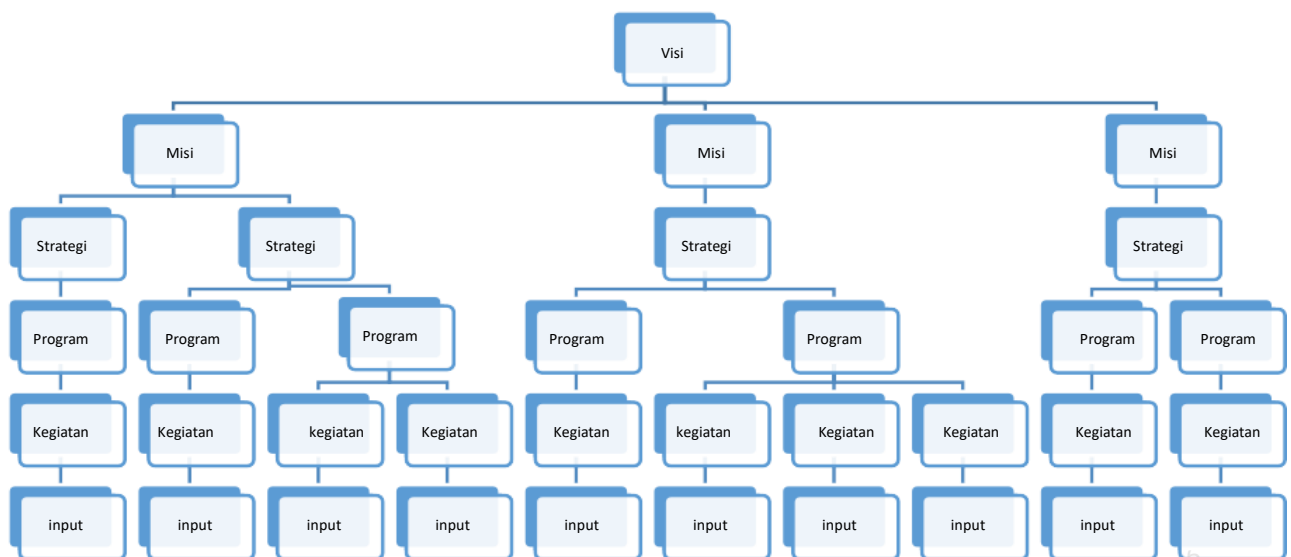
- indikator masukan,
- indikator keluaran, dan
- indikator hasil/manfaat.

Secara hierarkis, jenis indikator terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

- **Indikator *Impact*:** Menunjukkan pengaruh/perubahan, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah digunakan;
- **Indikator *Outcomes*:** Mengukur capaian dari pelaksanaan program melalui berbagai kegiatan. Mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah;
- **Indikator *Output*:** Mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan; dan
- **Indikator *Input*:** Mengukur jumlah dan kualitas sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Hirarki kinerja juga menunjukkan posisi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja pemerintah daerah yang akan membuktikan tercapainya Visi. Visi dicapai apabila terlaksana dan tercapainya tujuan semua Misi. Misi kemudian diturunkan kepada strategi, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas / institusi terkait. Semua itu didukung dengan kebijakan yang jelas yang mendukung strategi agar semua Misi tercapai sesuai tujuannya. Oleh karena itu hirarki Indikator juga dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Hirarki Indikator Kinerja Pembangunan



III. METODA

Peninjauan kembali sebuah rencana merupakan kegiatan monitoring dan mengevaluasi yang dilakukan terhadap dokumen rencana dan hasil implementasi rencana. Evaluasi adalah proses “penilaian” yang sistematis dan objektif terhadap sesuatu dengan mengkaji dan membuat keputusan secara hati-hati berdasarkan berbagai faktor tertentu. Review dilakukan terhadap semua Bab dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan, namun lebih difokuskan kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target – targetnya.

3.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan review RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- Pendekatan objektif:
Review IKU dilakukan secara objektif menggunakan standar dan aturan yang berlaku, serta perbandingan dengan aturan yang ada. Pohon kinerja, indikator dan target IKU yang dibuat sebagai kerangka berpikir penetapan IKU RPJMD 2021-2026 dievaluasi dan didiskusikan bersama stakeholders, khususnya OPD terkait. IKU yang jumlahnya 52 (limapuluh dua) dengan target – target objektifnya dianalisis dan dirasionalisasi.
- Pendekatan subjektif:
Review IKU juga dilakukan dengan pendekatan subjektif, yakni memperhatikan sistem nilai, capaian serta kualitas hasil kinerja tahun 2021-2022 yang dipengaruhi kualitas sumberdaya yang tersedia. Target yang tidak tercapai maupun capaian yang melewati target pada tahun 2021-2022 diidentifikasi dan dianalisis untuk dilakukan pula rasionalisasi. Tujuannya agar target2 yang masih tersisa untuk tahun 2023-2026 dapat dicapai dengan kondisi yang lebih baik.
- Asumsi-asumsi tertentu.
Penilaian terhadap RPJMD 2021-2026 ini selain menggunakan pendekatan objektif dan subjektif di atas, juga memperhatikan

kondisi keuangan daerah, implementasi dan hasil intervensi program yang sedang berlangsung atau yang telah selesai sesuai peraturan perundangan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penertiban Aparatur Negara yang berlaku. IKU dinilai berdasarkan cakupan kinerja daerah sesuai Visi dan Misi yang ditetapkan.

3.2. Tahapan

Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan. Selanjutnya evaluasi dilakukan terhadap semua IKU dan target2nya. Tahapan kerja evaluasi RPJMD 2021-2026 Kabupaten pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- Review umum dan materi Bab per Bab
- Review 52 (limapuluh dua) indikator yang ditetapkan sebagai IKU
- Evaluasi realisasi capaian IKU tahun 2021 dan 2022 (apabila ada data)
- Rekomendasi Rasionalisasi target IKU tahun 2023-2026
- Penutup

3.3. Lingkup Kegiatan

- a. Mereview dokumen RPJMD bab per bab dan menyandingkan muatannya dengan peraturan perundangan berlaku, yakni Permendagri No.86 tahun 2017.
- b. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan stakeholders (OPD Terkait) difasilitasi Tim Pelaksana Kerja Review RPJMD, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Menyusun rekomendasi terhadap rasionalisasi standar dan target IKU RPJMD 2021-2026 berdasarkan hasil FGD.

Evaluasi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan ini juga memperhatikan:

1. Kaidah kerangka logis (*logical framework*) menggunakan *cascade* IKU yang disusun untuk RPJMD 2021-2026;
2. Perkembangan kondisi sosial ekonomi daerah kabupaten Pesisir Selatan terutama akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian;
3. Realisasi capaian indikator pembangunan, yakni realisasi IKU tahun 2021 dan 2022;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
8. Memperhatikan program prioritas yang fokus pada pencapaian sasaran strategis RPJMD.

IV. HASIL REVIEW

4.1. Hasil Review Dokumen RPJMD 2021-2026

Secara umum penyajian dokumen RPJMD 2021-2026 Kab Pesisir Selatan sudah memenuhi sistematika sebagaimana diatur Permendagri No. 86 tahun 2007, yakni terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
- d. BAB IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. BAB IX Penutup

Tabel 1 menyajikan hasil review terhadap muatan materi Bab per Bab RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1. Hasil Review Dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan

Materi Dokumen RPJMD 2021-2026		Hasil Review Materi
Bab	Judul bab	
I	Pendahuluan	Latar belakang di dalam bab pendahuluan terdiri dari pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Namun, dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan belum menyajikan secara eksplisit bentuk keterkaitan substansi perencanaan dimaksud.

Materi Dokumen RPJMD 2021-2026		Hasil Review Materi
		Tujuan penyusunan perencanaan baru sebatas tujuan penyusunan dokumen, dan belum ada tujuan penyusunan perencanaan sebagai pedoman monitoring dan evaluasi dan dasar pengawasan.
II	Gambaran Umum Kondisi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu efisiensi dalam penyajian (contoh: Tabel dan Gambar menjelaskan tentang data yang sama, 2 tabel dapat disatukan) • Antar gambar atau tabel perlu pengantar • Ada data yang kurang diberi makna (misal daya tarik wisata) • Data yang digunakan masih ada yang tahun 2017 (daya dukung daya tamping LH) • Secara umum Bab II seharusnya banyak dikaitkan dengan Isu Strategis (Bab IV) dan Visi Misi (Bab V) • Perlu analisis dan penjelasan data-data yang disajikan, misalnya pada Tabel 2.12 indeks jasa ekosistem bayang dan bayang utara sangat berbeda (masing-masing mempunyai indeks jasa ekosistem terendah dan tertinggi) • Penyajian data yang sama dalam bentuk tabel dan grafik tidak diperlukan. Misalnya informasi grafik 2.11 sudah disajikan pada tabel 2.12. Sebaiknya ditambahkan pembahasan atau penjelasan dari indeks yang diperoleh. • Perlu dijelaskan kalau daya dukung pangan yang dimaksud adalah memang produksi padi saja • Pada tabel 2.16 tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud kebutuhan air orang yang tinggal di kawasan perkebunan, lahan pertanian basah, dan kering? atau kebutuhan air untuk kebutuhan perkebunan, pertanian, dst. narasi yang dijelaskan sebelum tabel ini berbeda dengan isi tabel 2.16 • Beberapa pernyataan perlu penjelesan lebih lanjut, misalnya Kebutuhan air kawasan

Materi Dokumen RPJMD 2021-2026		Hasil Review Materi
		pertanian lahan basah lebih besar dari kawasan pertanian lahan kering
III	Gambaran Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambah penjelasan mengapa kondisi keuangan demikian terjadi • Perlu ditambahkan analisis kinerja keuangan masa lalu seperti perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambar realisasi belanja daerah • Sebaiknya dana diluar APBD dan APBN juga diperhitungkan sebagai kemampuan keuangan daerah • Perlu didukung dengan neraca daerah seperti analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan aktifitas • Perlu ditambahkan analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu
IV	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada keterkaitan yang lebih kuat masalah dengan Isu strategis • Telaah isu strategis berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat belum dipaparkan dengan baik • Pada bagian telaah isu strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) seharusnya dapat dipetakan isu strategis di kabupaten Pesisir Selatan ke tujuh belas TPB • Telaah isu strategis berdasarkan RTRW seharusnya dapat menganalisis keintegrasian atau kesesuaian dengan RTRW • Isu strategis tidak berdasarkan gambaran kondisi saat ini, serta tidak semua isu strategis masuk dalam program. • Pada bagian akhir sub bab permasalahan dan isu strategis disimpulkan delapan isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten Pesisir Selatan, namun kedelapan poin tersebut lebih mengarah pada strategi
V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Visi dan misi hendaknya dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran sehingga dapat dioperasionalkan dengan baik melalui

Materi Dokumen RPJMD2021-2026		Hasil Review Materi
		<p>program-program pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah disajikan tabel proyeksi target - target indikator makro tahun 2026, namun belum didukung dengan hasil analisis dan data sebelumnya sebagai premis perencanaan
VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan strategi dan arah kebijakan saling tertukar / saling menggantikan • Pemaparan program pembangunan daerah hendaknya dilengkapi dengan OPD penanggungjawab sehingga menunjukkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam pencapaian sebuah program
VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. • Analisis dan diskusi dapat dilakukan berdasarkan realisasi tahun 2021 dan basis tahun 2020
VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan target setiap indikator kinerja perlu didukung dengan analisis kondisi RPJMD periode sebelumnya dan menggunakan data realisasi terbaru. • Pengumpulan data dan informasi perlu didukung dengan metoda yang jelas dan dipahami semua stakeholders. • OPD seharusnya dapat mengukur kinerjanya sejak awal supaya tidak terjadi penurunan dalam realisasi • Perubahan aplikasi seharusnya tidak membuat kinerja turun apabila butir - butir penilaian selalu dipantau, tercatat dan tersimpan dengan baik. • Walaupun kinerja tidak diukur oleh kabupaten, butir - butir penilaian sebaiknya diidentifikasi dan dipantau sejak awal untuk dapat membuat proyeksi bayangan sebelum kinerja dinilai.
IX	Bab IX Penutup	Perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, misalnya bentuk pendekatan teknokratik/partisipatif yang telah dilaksanakan.

Materi Dokumen RPJMD 2021-2026	Hasil Review Materi

4.2. Review Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Review kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung rasionalisasi kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan sampai akhir periode RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut hasil review terhadap kerangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 2. Hasil review Kerangka Pendanaan terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Uraian	Hasil Review Materi
1.	Kerangka Pendanaan	1. Perlu penambahan asumsi-asumsi kekinian terkait pengelolaan keuangan daerah.
1.	Pendapatan Daerah	2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu kurang dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. 3. Realisasi Pendapatan Transfer tidak terlalu signifikan berbeda dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMD. Namun seiring dengan keluarnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, bahwa perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam beberapa hal terkait dana transfer. 4. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang

		sah kurang dari target yang ditetapkan.
2.	Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu penyesuaian alokasi belanja dengan pendapatan - Perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru dalam pengalokasian belanja daerah. - Perlu penyesuaian pendanaan pada setiap program-program prioritas RPJMD
3.	Pembiayaan Daerah	Perlu perumusan kembali tentang penggunaan SiLpa

Hasil analisis dan rasionalisasi terhadap kerangka pendanaan tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rasionalisasi Pendapatan Daerah RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan

	URAIAN	TAHUN							
		2021	Realisasi 2021	2022	Realisasi 2022	2023	2024	2025	2026
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,952,089,082	145,028,893,400	158,523,499,750	145,678,296,972	129,235,940,268	130,312,606,754	131,425,865,789	132,557,073,241
	Pendapatan Pajak Daerah	26,030,589,152	21,915,236,928	27,141,310,000	27,788,857,519	28,889,395,300	29,140,293,799	29,382,743,472	29,635,646,340
	Pendapatan Retribusi Daerah	4,457,761,321	3,686,867,311	4,493,698,750	3,990,134,633	5,225,118,400	5,270,635,548	5,316,000,912	5,361,756,744
	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,000,000,000	8,220,222,551	10,595,517,000	9,928,421,974	11,655,068	11,612,984	11,712,939	11,813,754
	Lain-lain PAD yang sah	106,463,738,609	111,206,566,610	116,292,974,000	103,970,882,846	95,109,771,500	95,890,064,423	96,715,408,467	97,547,856,403
B	PENDAPATAN TRANSFER								
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1,436,130,826,272	1,400,268,880,552	1,458,110,869,688	1,440,234,317,931	1,475,482,405,421	1,488,286,795,752	1,502,602,712,856	1,514,354,525,092
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA	16,682,614,000	33,290,293,000	16,690,955,307	27,398,107,147	19,024,468,000	19,244,372,791	20,079,323,557	20,252,150,118
	Dana Alokasi Umum	802,984,691,000	777,267,217,000	823,059,308,275	776,752,519,759	816,657,630,000	823,692,335,405	831,618,650,656	838,101,479,060
	Dana Alokasi Khusus	351,243,877,000	304,770,801,056	351,419,499,940	383,116,952,328	406,791,404,000	410,270,119,930	413,299,409,883	416,519,220,765
	Dana penyesuaian	204,546,932,000	204,546,932,000	206,262,326,623	161,021,564,000	172,360,056,000	173,862,954,180	175,694,081,125	177,037,545,617
	Dana Insentif Daerah	-							
	Dana Desa	-							
	Transfer Antar Daerah	-							
	Pendapatan Bagi Hasil	60,672,712,272	72,893,637,496	60,678,779,543	91,945,174,697	60,648,847,421	61,217,013,446	61,911,247,634	62,444,129,531
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	7,500,000,000	-	-	-	-	-	0
C	LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH	152,314,186,251	137,584,475,084	153,837,328,114	44,649,326,814	40,000,000,000	40,313,643,001	40,158,647,114	40,504,300,236
	Pendapatan Hibah	152,314,186,251	137,584,475,084	153,837,328,114	44,649,326,814	40,000,000,000	40,313,643,001	40,158,647,114	40,504,300,236
	Jumlah	1,734,397,101,605	1,682,882,249,036	1,770,471,697,552	1,630,561,941,717	1,644,718,345,689	1,658,913,045,506	1,674,187,225,759	1,687,415,898,569

Tabel 4. Rasionalisasi Belanja Daerah RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Realisasi dan Proyeksi							
		Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN								
5	BELANJA	1,729,897,102,605.00	1,591,682,331,642.00	1,765,971,697,548.44	1,629,156,880,487.00	1,644,718,345,689.00	1,658,913,045,506.45	1,674,187,225,758.74	1,687,415,898,569.10
5 1	BELANJA OPERASI	1,200,810,078,936.00	1,117,706,743,797.00	1,231,734,576,828.50	1,119,369,639,675.00	1,213,805,096,794.67	1,202,256,664,626.91	1,194,708,384,320.44	1,195,445,127,721.41
5 1 01	Belanja Pegawai	794,191,803,282.00	727,099,701,447	810,075,639,347.64	689,441,378,818	789,807,125,064	799,200,939,022.71	803,358,750,902.12	805,907,577,649.52
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	349,070,877,021.00	351,096,747,450	364,105,784,108.00	371,816,057,313	383,758,322,835	326,370,893,924.90	337,554,918,652.56	336,625,014,292.21
5 1 03	Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
5 1 04	Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
5 1 05	Hibah	57,296,398,633.00	39,267,294,900	57,302,128,272.86	55,477,114,969.00	40,098,801,274.94	76,446,745,561.77	53,560,059,193.41	52,681,728,321.70
5 1 06	Bantuan Sosial	251,000,000.00	243,000,000	251,025,100.00	2,635,088,575.00	140,847,620.66	238,086,117.54	234,655,572.35	230,807,457.98
5 2	BELANJA MODAL	264,811,989,760.00	218,718,458,162.00	275,654,783,001.94	263,195,433,274.00	213,763,640,590.87	211,402,844,737.38	237,759,264,854.66	254,215,289,030.79
5 2 01	Belanja Tanah	3,750,000,000.00	1,843,708,112	3,750,375,000.00	506,538,418.00	1,334,175,680.13	3,557,063,509.00	3,505,810,343.93	3,448,318,595.38
5 2 02	Belanja Peralatan dan Mesin	56,338,729,723.00	44,793,031,321	56,344,363,595.97	70,113,670,812.00	42,964,882,567.00	47,749,953,712.88	59,210,547,871.61	65,592,290,593.11
5 2 03	Belanja Gedung dan Bangunan	52,617,128,666.00	45,060,632,789	52,622,390,378.87	37,752,377,626.00	47,564,963,651.79	43,470,136,146.29	50,306,934,750.94	53,605,680,363.05
5 2 04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147,090,060,370.00	120,364,078,190	157,921,081,419.00	149,489,587,144.00	115,657,353,946.04	111,867,695,871.55	120,046,533,594.53	126,956,463,236.98
5 2 05	Belanja Aset Tetap Lainnya	5,016,071,001.00	6,657,007,750	5,016,572,608.10	5,333,259,274.00	6,242,264,745.91	4,757,995,497.66	4,689,438,293.65	4,612,536,242.27
5 3	BELANJA TAK TERDUGA	7,218,401,854.00	971,695,559.00	1,500,000,000.00	1,515,568,300.00	4,856,814,505.52	1,422,398,641.34	1,401,763,348.12	1,378,637,981.28
5 3 01	Belanja Tak Terduga	7,218,401,854.00	971,695,559	1,500,000,000.00	1,515,568,300.00	4,856,814,506	1,422,398,641.34	1,401,763,348.12	1,378,637,981.28
5 4	BELANJA TRANSFER	257,056,632,055.00	254,285,434,124.00	257,082,337,718.00	245,076,239,238.00	212,292,793,797.95	243,831,137,500.82	240,317,813,235.53	236,376,843,835.62
5 4 01	Belanja Bagi hasil	4,402,674,555.00	4,083,224,024	4,403,114,822.00	3,721,283,638.00	3,430,784,772.73	4,176,158,133.33	4,115,984,532.23	4,048,486,543.69
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	252,653,957,500.00	250,202,210,100	252,679,222,896.00	241,354,955,600.00	208,862,009,025.21	239,654,979,367.48	236,201,828,703.29	232,328,357,291.93

Selanjutnya Rasionalisasi Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan sebagaimana Tabel 5 berikut :

**Rasionalisasi Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pesisir Selatan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
				target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100	100	794,191,803	100	810,075,639	100	922,675,660,746	100	952,425,574,485	100	967,699,754,737	100	980,970,565,248	100	3,825,375,822,658	Semua OPD
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							635,366,399		635,674,411		359,865,465,167		359,977,465,167		359,977,465,167		359,977,465,167		1,441,068,901,478	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					119,593,155		131,547,471		155,256,186,911		155,256,186,911		155,256,186,911		155,256,186,911		621,305,888,270	OPD yang melaksanakan urusan pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PALUD	62.30	62.30	108,500,500	62.92	119,350,550	63.55	155,150,296,061	64.19	155,000,000,000	64.83	155,000,000,000	65.48	155,000,000,000	97	620,378,147,111	
				APK SD	111.64	111.64		110.52		109.42		108.32		107.24		106.17		100		
				APK SMP	84.78	85.63		86.48		87.35		88.22		89.10		90.00		99.8		
				APM PALUD	53.6	53.65		54.19		54.73		55.28		55.83		56.39		70		
				APM SD	99.43	99.48		99.53		99.58		99.63		99.68		99.73		100		
				APM SMP	78.85	79.64		80.43		81.24		82.05		82.87		83.70		90		
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	1	1	121,855	2	134,041	2	135,890,850	2	135,890,850	2	135,890,850	2	135,890,850	2	543,819,296	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap satuan pendidikan	85	88	10,920,800	90	12,012,880	91	92	120,000,000	93	120,000,000	94	120,000,000	94	382,933,680		
				Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kompetensi	86.76	87		88		89		90	50,000,000	91	50,000,000	92	50,000,000	92		150,000,000
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah izin sekolah dikelola masyarakat yang	5	7	50,000	8	50,000	9		10	296,061	11	296,061	12	296,061	12	988,183	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					316,650,000		317,550,000		66,650,020,743		66,637,020,743		66,637,020,743		66,637,020,743		267,195,282,972	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72.14	74	295,000,000	78	295,500,000	81	60,802,403,962	86	60,779,403,962	90	60,779,403,962	90	60,779,403,962	90	243,731,115,848	OPD yang melaksanakan urusan kesehatan
				Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73.4	77.5	20,000,000	82.5	20,250,000	87.5		92.50	26,215,679	100	26,215,679	100	26,215,679	100	26,215,679	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang mempunyai Tenaga Kesehatan sesuai Standar	20	60	500,000	70	550,000	80	4,026,215,679	90	4,010,000,000	100	4,010,000,000	100	4,010,000,000	95	16,057,265,679	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	70	75	750,000	80	800,000	85	350,127,250	90	350,127,250	100	350,127,250	100	350,127,250	80	1,402,059,000	
				Persentase PIRT yang memenuhi standar	60	65		70		80		90	13,200,000	100	13,200,000	100	13,200,000			
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81 Nagari	100	400,000	120	450,000	140	1,471,273,852	160	1,471,273,852	182	1,471,273,852	182	1,471,273,852	182	5,885,945,408	
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					174,722,166		150,390,571		129,249,525,238		129,339,525,238		129,339,525,238		129,339,525,238		517,593,213,689	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	2,500,000	35,63	7,949,338	36,62	11,989,000,000	37,97	11,989,000,000	39,28	11,989,000,000	40,10	11,989,000,000	70,00	47,966,449,338	OPD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dileyani jaringan irigasi	57,05	59,05	20,000,000	59,20	11,245,733	60,75		62,60	115,000,000	64,60	115,000,000	66,70	115,000,000	66,70	115,000,000	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga disekolah kabupaten	87,80	88,66	21,585,190	89,37	23,633,000	90,08	6,075,000,000	90,79	6,005,000,000	91,50	6,005,000,000	92,21	6,005,000,000	92,21	24,135,218,190	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah perkotaan	0	0	650,000	20	2,250,000	30	-	40	45,000,000	50	45,000,000	60	45,000,000	60	137,900,000	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	75,27	76,13	14,921,943	76,74	13,855,000	77,48	5,685,000,000	78,36	5,600,000,000	79,25	5,600,000,000	80,18	5,600,000,000	80,18	22,513,776,943	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	11,20	12,73	2,870,232	14,33	2,700,000	15,94	300,000,000	17,75	300,000,000	19,15	300,000,000	20,76	300,000,000	20,76	1,205,570,232	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penataan permukiman di kawasan strategis kabupaten	n/a	30	313,000	32	600,000	34	-	36	85,000,000	38	85,000,000	40	85,000,000	40	255,913,000	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	80,59	83,43	10,049,452	85,77	3,685,000	87,65	2,100,000,000	88,96	2,100,000,000	89,71	2,100,000,000	90,26	2,100,000,000	90,26	8,413,734,452	
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian bangunan dan	n/a	38,46	6,003,365	46,15	2,890,000	53,85	2,100,000,000	61,54	2,100,000,000	69,23	2,100,000,000	69,23	2,100,000,000	69,23	8,408,893,365	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemampatan jalan Kabupaten	40,36	41,11	95,084,877	41,86	80,767,500	42,61	100,160,537,000	43,36	100,160,537,000	44,11	100,160,537,000	44,86	100,160,537,000	44,86	400,818,000,377	
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	42,00	43,11	-	44,22	-	45,33		46,44		47,56		48,67		48,67	-	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	24,66	34,25	243,000	45,66	205,000	57,08	289,988,235	68,49	289,988,235	79,91	289,988,235	91,32	289,988,235	91,32	1,160,400,940	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya	41,67	50,00	501,107	58,33	610,000	66,67	550,000,003	75,00	550,000,003	83,33	550,000,003	85,00	550,000,003	85,00	2,201,111,119	
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					13,998,281		23,950,000		4,218,243,588		4,275,243,588		4,275,243,588		4,275,243,588		17,081,922,633	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	n/a	n/a	-	50	1,250,000	60	985,727,379	70	985,727,379	80	985,727,379	90	985,727,379	90	3,944,159,516	OPD yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	0.0009	0.0214	-	0.0214	6,850,000	0.0219	-	0.0224	9,900,000	0.0229	9,900,000	0.0234	9,900,000	0.0234	36,550,000	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (%)	1,25	9,92	11,925,000	9,48	13,250,000	8,9	309,992,510	8,29	300,092,510	7,58	300,092,510	6,79	300,092,510	6,79	1,235,445,040	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	37,5	50	2,073,281	60	2,500,000	70,21	2,922,523,699	79,59	2,922,523,699	88,24	2,922,523,699	100	2,922,523,699	100	11,694,668,077	
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG	Persentase Pengembangan Perumahan yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi	n/a	60	-	60	100,000	75	-	80	57,000,000	85	57,000,000	90	57,000,000	90	171,100,000	
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4,804,787		6,033,348		2,207,546,768		2,215,546,768		2,215,546,768		2,215,546,768		8,865,025,207	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondiei Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda yang ditegakkan	67	70	1,032,522	75	1,135,774	79	209,635,884	85	209,635,884	89	209,635,884	90	209,635,884	90	840,711,831	OPD yang melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perindungan masyarakat
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	1,847,198	100	2,780,000	100	-	100	97,000,000	100	97,000,000	100	97,000,000	100	295,627,198	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	33	35	1,925,067	37	2,117,574	40	1,997,910,884	45	1,908,910,884	50	1,908,910,884	60	1,908,910,884	60	7,728,686,177	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5,598,010		6,203,021		2,253,941,919		2,253,941,919		2,253,941,919		2,253,941,919		9,027,568,707	OPD yang melaksanakan urusan sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	80	82	413,200	84	499,730	86	1,477,016,563	88	1,477,016,563	90	1,477,016,563	92	1,477,016,563	92	5,908,979,182	
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN	Jumlah masyarakat yang dipulangkan karena	N/A	40	300,000	45	330,000	50		55	19,000,000	60	19,000,000	65	19,000,000	70	57,630,000	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	51.93	100	1,714,810	100	1,886,291	100	296,632,526	100	296,632,526	100	296,632,526	100	296,632,526	80	1,190,131,205	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang valid	82	84	2,000,000	86	2,200,000	88	127,287,828	90	127,287,828	96	127,287,828	98	127,287,828	98	513,351,312	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan	100	100	870,000	100	957,000	100	310,528,927	100	310,528,927	100	310,528,927	100	310,528,927	100	1,243,942,708	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang	100	100	600,000	100	660,000	100	42,476,075	100	42,476,075	100	42,476,075	100	42,476,075	100	171,164,300	
rusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							35,429,584		39,891,976		36,697,697,117		37,729,287,151		37,729,287,151		37,729,287,151		149,960,880,130	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				775,000		900,000		137,254,533		137,254,533		137,254,533		137,254,533		550,693,132	OPD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen rencana tenaga kerja	n/a	1	100,000	1	100,000	1	30,000,058	1	30,000,058	1	30,000,058	1	30,000,058	6	120,200,232	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	65.6	68.5	225,000	71.25	275,000	73.45	38,254,819	75.5	38,254,819	77.35	38,254,819	77.35	38,254,819	77.35	153,519,276	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	152	175	250,000	185	300,000	190	43,999,826	195	43,999,826	198	43,999,826	200	43,999,826	198	176,549,304	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	25.5	30.6	200,000	35.45	225,000	40.15	24,999,830	45.5	24,999,830	48.75	24,999,830	48.75	24,999,830	48.75	100,424,320	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,330,000		2,563,000		491,913,240		499,913,240		499,913,240		499,913,240		1,996,545,960	OPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran responspif gender	66.67	73.33	600,000	80	660,000	87	350,113,856	93.33	350,113,856	100	350,113,856	100	350,113,856	100	1,401,715,424	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0192	0.01784	610,000	0.0156	671,000	0.0134	10,737,726	0.011	10,737,726	0.009	10,737,726	0.0062	10,737,726	0.0062	44,231,904	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KORT	0.0072	0.0069	200,000	0.0064	220,000	0.0055	-	0.0045	8,000,000	0.0039	8,000,000	0.0039	8,000,000	0.0039	24,420,000	
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan Dokumen Profil Gender dan Anak	2	2	50,000	2	55,000	2	31,823,580	2	31,823,580	2	31,823,580	2	31,823,580	2	127,399,320	
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase cakupan pemenuhan hak anak	40	45	545,000	50	599,500	55	77,367,276	60	77,367,276	65	77,367,276	65	77,367,276	65	310,613,604	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	70	75	375,000	77	412,500	79	53,694,382	82	53,694,382	85	53,694,382	85	53,694,382	85	215,565,028	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3,169,351		3,930,000		444,999,958		622,999,958		622,999,958		622,999,958		2,321,099,183	OPD yang melaksanakan urusan pangan
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)	49	45	534,351	80	550,000	80	-	80	55,000,000	80	55,000,000	100	55,000,000	100	166,084,351	
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersedian Energi (kilo kalori/kapita/hari)	3,687	3,700	2,500,000	3,710	2,850,000	3,720	155,000,202	3,730	155,000,202	3,740	155,000,202	3,750	155,000,202	3,750	625,350,808	
				Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	67.64	68	-	69	-	70	-	71	-	72	-	73	-	73	-	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAUANGAN PANGAN	Berkurangnya Nagari Rawan Pangan	2	2	135,000	2	150,000	2	289,999,756	2	289,999,756	2	289,999,756	2	289,999,756	2	1,160,284,024	
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Registrasi PSAT (Beras)	0	0	0	5	380,000	6	-	7	123,000,000	8	123,000,000	9	123,000,000	9	369,380,000	
				Rekomendasi sertifikat prima	0	0	0	5	-	7	-	9	-	11	-	12	-	12	-	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				782,299		1,545,000		127,203,742		312,203,742		312,203,742		312,203,742		1,066,142,267	OPD yang melaksanakan urusan pertanahan
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian izin lokasi	100	100	44,000	100	75,000	100	-	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,119,000	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah negara	100	100	-	100	150,000	100	36,377,985	100	36,377,985	100	36,377,985	100	36,377,985	100	145,661,940	
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat penerima santunan tanah	100	100	57,000	100	150,000	100	15,993,040	100	15,993,040	100	15,993,040	100	15,993,040	100	64,179,160	
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase subjek dan objek yang teredistribusi	0	100	121,100	100	370,000	100	37,266,984	100	37,266,984	100	37,266,984	100	37,266,984	100	149,559,036	
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	0	100	74,400	100	150,000	100	22,893,506	100	22,893,506	100	22,893,506	100	22,893,506	100	91,798,424	
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pemanfaatan tanah kosong	0	100	83,200	100	150,000	100	-	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	450,233,200	
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pemanfaatan tanah negara	0	100	49,200	100	100,000	100	-	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,149,200	
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	60.873	64.69	353,400	68.31	400,000	72.02	14,672,227	75.74	14,672,227	79.46	14,672,227	83.17	14,672,227	83.17	59,442,308	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				7,015,000		7,617,000		9,886,139,988		9,969,139,988		9,969,139,988		9,969,139,988		39,808,191,952	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	2	2	375,000	2	420,000	2	307,970,925	2	307,970,925	2	307,970,925	2	307,970,925	12	1,232,678,700	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	90	90.31	90,000	90.84	120,000	91.15	473,763,618	91.42	473,763,618	91.80	473,763,618	92.10	473,763,618	92.10	1,895,264,472	
				Indeks Kualitas tutupan lahan	71.78	71.78	-	71.78	-	71.78	-	71.78	-	71.78	-	71.78	-	71.78	-	
				Indek kualitas udara	91.81	91.82	-	91.82	-	91.86	-	91.90	-	92.20	-	91.30	-	91.30	-	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase lusanan KEHATI yang dikelola	n.a	1	1,000,000	1	1,250,000	1	1,800,000,000	2	1,800,000,000	2	1,800,000,000	2	1,800,000,000	9	7,202,250,000	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan LB3	1.6	1.6	5,000	1.63	55,000	1.7	8,445,428	1.74	8,445,428	1.75	8,445,428	1.76	8,445,428	10.18	33,841,712	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang diterbitkan	95	95	75,000	95	80,000	95	65,076,321	95	65,076,321	95	65,076,321	95	65,076,321	95	260,460,284	
				Persentase ketaatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	70	70	-	75	-	80	-	85	12,500,000	90	12,500,000	90	12,500,000	90	-	
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA yang diakui	n.a	0	10,000	2	12,000	2	-	3	70,000,000	4	70,000,000	4	70,000,000	15	210,022,000	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok masyarakat/komunitas yang peduli lingkungan hidup	3	3	355,000	4	360,000	5	25,000,115	6	25,000,115	7	25,000,115	7	25,000,115	32	100,715,460	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat	n.a	2	75,000	5	85,000	5	-	5	13,000,000	5	13,000,000	5	13,000,000	27	39,160,000			
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	75	75	30,000	80	35,000	85	29,999,906	90	29,999,906	95	29,999,906	95	29,999,906	95	120,064,624			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kualitas Pengolahan Sampah	42,43	42,45	5,000,000	42,47	5,200,000	42,50	7,175,883,675	42,57	7,175,883,675	42,60	7,175,883,675	42,60	7,175,883,675	42,60	28,713,734,700			
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1,200,000		1,200,000		-		85,090,034		85,090,034		85,090,034		257,670,102	OPD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP Elektronik	0.977	0.978	450,000	0.983	450,000	0.985	-	0.989	24,000,000	0.993	24,000,000	0.995	24,000,000	0.995	72,900,000			
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio penduduk yang memiliki KIA	65	66	200,000	67	200,000	68	69	70	15,000,000	71	15,000,000	71	15,000,000	71	45,400,000			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan dokumen pencatatan sipil	96	97	300,000	97.5	300,000	97.7	-	97.9	22,000,000	98	22,000,000	98.3	22,000,000	98.3	66,600,000			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	95	95.8	150,000	96	150,000	96.5	-	97	9,000,000	97.5	9,000,000	98	9,000,000	98	27,300,000			
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen profil penduduk yang dihasilkan	1	1	100,000	1	100,000	1	-	1	15,090,034	1	15,090,034	1	15,090,034	1	45,470,102			
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					12,259,000		12,275,000		2,943,383,532		2,943,383,532		2,943,383,532		2,943,383,532		11,816,359,128	OPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah nagari baru yang terbentuk	n/a	9	6,225,000	9	6,225,000	9	-	9	5,700,000	9	5,700,000	9	5,700,000	9	29,550,000			
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Peningkatan status desa mandiri (nagari)	7	9	-	11	-	13	-	15	-	17	-	17	-	17	-			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54	60	375,000	65	400,000	70	2,498,200	75	2,498,200	80	2,498,200	85	2,498,200	80	10,767,800			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	n/a	75	3,800,000	80	3,800,000	90	2,226,718,448	95	2,226,718,448	100	2,226,718,448	100	2,226,718,448	100	8,914,473,792			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju	545	575	1,850,000	580	1,850,000	590	714,466,884	602	714,466,884	616	714,466,884	620	714,466,884	616	2,861,567,536			
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7,530,000		7,550,000		8,135,316,024		8,135,316,024		8,135,316,024		8,135,316,024		24,556,364,096	OPD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk	1.57	1.45	200,000	1.35	200,000	1.25	263,400,000	1.10	263,400,000	0.95	263,400,000	0.90	263,400,000	0.90	1,054,000,000			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total	2.83	2.81	6,500,000	2.80	6,500,000	2.78	3,483,316,024	2.76	3,483,316,024	2.75	3,483,316,024	2.74	3,483,316,024	2.74	13,946,254,096			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase organisasi KB yang aktif (persen)	37	42.00	850,000	47.00	850,000	52.00	2,388,600,000	57.00	2,388,600,000	62.00	2,388,600,000	65.00	2,388,600,000	65.00	9,556,100,000			
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11,500,000		13,000,000		8,073,033,620		8,073,033,620		8,073,033,620		8,073,033,620		32,316,634,480	OPD yang melaksanakan urusan perhubungan		
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kinerja lalu lintas kabupaten kota	0.27	0.27	11,000,000	0.26	12,500,000	0.25	8,032,889,470	0.24	8,032,889,470	0.23	8,032,889,470	0.22	8,032,889,470	0.22	32,155,057,880			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah orang / penumpang yang melalui dermaga perahun (orang)	41041	42000	500,000	43,000	500,000	44,000	40,144,150	45,000	40,144,150	46,000	40,144,150	47,000	40,144,150	267,000	161,576,600			
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4,544,812		4,999,293		3,834,261,342		3,834,261,342		3,834,261,342		3,834,261,342		15,346,589,473	OPD yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika		
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	90	100	782,664	100	860,931	100	1,106,875,127	100	1,106,875,127	100	1,106,875,127	100	1,106,875,127	100	4,429,144,103			
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90	92	3,762,148	100	4,138,362	100	2,727,386,215	100	2,727,386,215	100	2,727,386,215	100	2,727,386,215	100	10,917,445,370			
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					979,615		850,000		8,711,233,800		8,681,233,800		8,681,233,800		8,681,233,800		34,756,764,815	OPD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah		
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN ZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25 koperasi	30,000	25 koperasi	30,000	30 koperasi	-	35 koperasi	96,000,000	40 koperasi	96,000,000	45 koperasi	96,000,000	45 koperasi	288,030,000			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25 koperasi	388,525	25 koperasi	150,000	30 koperasi	-	35 koperasi	70,000,000	40 koperasi	70,000,000	45 koperasi	70,000,000	45 koperasi	210,538,525			
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSIUSP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25 koperasi	50,000	25 koperasi	50,000	30 koperasi	33,499,800	35 koperasi	33,499,800	40 koperasi	33,499,800	45 koperasi	33,499,800	45 koperasi	134,049,200			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25 koperasi	390,304	25 koperasi	100,000	30 Koperasi	406,770,000	35 koperasi	406,770,000	40 koperasi	406,770,000	45 koperasi	406,770,000	45 koperasi	1,627,570,304			
2	17	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25 koperasi	43,006	25 koperasi	100,000	30 koperasi	25,000,000	35 koperasi	25,000,000	40 koperasi	25,000,000	45 koperasi	25,000,000	45 koperasi	100,143,006			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase peningkatan omset UMK (%)	n/a	7	57,780	7	120,000	7	49,000,000	7	49,000,000	7	49,000,000	7	49,000,000	42	196,177,780			
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase peningkatan omset UMK	n/a	7	100,000	7	300,000	7	8,196,964,000	7	8,000,964,000	7	8,000,964,000	7	8,000,964,000	42	32,200,256,000			
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	5	5	50,000	10	100,000	15	20	20	100,964,000	25	100,964,000	30	100,964,000	105	303,042,000	OPD yang melaksanakan urusan penanaman modal	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang menanamkan modal	17	19	100,000	21	100,000	23	-	25	90,000,000	26	90,000,000	28	90,000,000	142	270,200,000			
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pernyataan minat	1	3	100,000	7	100,000	12	127,609,783	17	127,609,783	22	127,609,783	26	127,609,783	87	510,639,132			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan	94.75	95	100,000	95	100,000	95	111,763,718	95	111,763,718	95	111,763,718	95	111,763,718	95	447,254,872			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian izin bermasalah yang terselesaikan	60	75	80,000	75	100,000	75	482,291,207	75	482,291,207	75	482,291,207	75	482,291,207	75	1,929,344,828			
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	50	50	150,000	50	150,000	50	-	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	330,300,000			
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					100,000		300,000		1,997,188,995		1,997,188,995		1,997,188,995		1,997,188,995		7,989,155,980	OPD yang melaksanakan urusan kepeumadan dan olah raga		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif	4.1	4.1	50,000	6.6	100,000	9.1	527,492,500	11.6	527,492,500	14.1	527,492,500	16.6	527,492,500	16.6	2,110,120,000			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	% Wira Usaha Muda	7.3	7.3	-	9.8	-	12.3	-	14.8	-	17.3	-	19.8	-	19.8	-			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	10	10	0	50	150,000	15	1,169,696,495	20	1,169,696,495	20	1,169,696,495	20	1,169,696,495	90	4,678,935,980			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	4	4	-	15	-	5	-	18	-	20	-	20	-	20	-			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembina Yang bersertifikasi	5	5	50,000	10	50,000	15	300,000,000	20	300,000,000	25	300,000,000	30	300,000,000	30	1,200,100,000			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Prestasi Kepramukaan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					112,270		123,497		144,166,996		194,166,996		194,166,996		194,166,996		726,903,751	OPD yang melaksanakan urusan Statistik		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan data statistik yang valid dan handal	100	100	112,270	100	123,497	100	144,166,996	100	194,166,996	100	194,166,996	100	194,166,996	100	726,903,751			
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					68,842		75,726		68,291,650		68,291,650		68,291,650		68,291,650		273,311,168	OPD yang melaksanakan urusan persandian		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	34.36	39																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.152.158		1.267.374		1.267.796.711		1.378.796.711		1.378.796.711		1.378.796.711		5.406.606.376		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi	222	222	758.984	230	834.882	235	973.698.728	240	973.698.728	245	973.698.728	250	973.698.728	250	3.896.388.778	OPD yang melaksanakan urusan kebudayaan	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	7	7	120.000	7	132.000	7	-	7	45.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000	7	135.252.000		
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah lokal yang dilestarikan	22	22	60.000	22	66.000	22	-	22	66.000.000	22	66.000.000	22	66.000.000	22	198.126.000		
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55.14	60	213.174	60	234.491	60	294.097.983	60	294.097.983	60	294.097.983	60	294.097.983	60	1.176.839.597		
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				800.583		527.500		636.722.236		672.722.236		672.722.236		672.722.236		2.656.217.027		
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks budaya baca masyarakat	n/a	0.18	775.583	0.2	500.000	0.22	636.722.236	0.24	636.722.236	0.26	636.722.236	0.29	636.722.236	71	2.548.164.527	OPD yang melaksanakan urusan perpustakaan	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dikoleksi	n/a	n/a	25.000	1	27.500	2	-	3	36.000.000	4	36.000.000	5	36.000.000	15	108.052.500		
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				369.655		443.586		155.825.598		281.325.598		281.325.598		281.325.598		1.000.615.633		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0.022	0.044	334.655	0.133	401.586	0.133	155.825.598	0.178	155.825.598	0.222	155.825.598	0.311	155.825.598	0.311	624.038.633	OPD yang melaksanakan urusan kearsipan	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	523	523	20.000	523	24.000	528	-	533	55.000.000	538	55.000.000	543	55.000.000	543	165.044.000		
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah	n/a	1	15.000	3	18.000	5	-	7	70.500.000	9	70.500.000	11	70.500.000	11	211.533.000		
	Usuran Pemerintahan Pilihan				49.019.838		41.779.833		59.552.288.430		51.759.057.211		51.759.057.211		51.759.057.211		178.374.392.187		
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				6.620.583		7.444.023		7.167.449.698		7.267.449.698		7.267.449.698		7.267.449.698		28.683.863.399		
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	44.440	35.549	4.399.898	35.727	4.477.325	35.906	3.334.277.793	36.085	3.334.277.793	36.266	3.334.277.793	36.447	3.334.277.793	36.447	13.345.948.395	OPD yang melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan	
		Jumlah keluarga perikanan tangkap yang meningkat pendapatannya	14.072	14.110		14.251		14.393		14.553		14.681		14.827		14.827			
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	16.763	12.618	1.415.685	13.250	2.070.698	13.913	1.718.272.845	14.608	1.718.272.845	15.339	1.718.272.845	16.106	1.718.272.845	16.106	6.876.577.764		
		Jumlah keluarga pelaku perikanan yang meningkat pendapatannya	3.292	3.357		3.424		3.492		3.561		3.632		3.704		3.704			
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase sumber daya perikanan yang terfudungi	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	0	100000000	0	100000000	0	0		
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	16	17	845.000	18	896.000	19	2.114.899.060	20	2.114.899.060	21	2.114.899.060	22	2.114.899.060	22	8.461.337.240		
		Jumlah keluarga pelaku pengolahan dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya	2.126	2.680		2.211		2.255		2.300		2.346		2.392		2.392			
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.500.000		3.700.000		6.404.911.373		6.545.700.373		6.545.700.373		6.545.700.373		26.048.212.492		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	1.000.000	3,15	1.000.000	3,2	5.371.376.323	3,35	5.371.376.323	3,3	5.371.376.323	3,35	5.371.376.323	3,35	21.487.505.292	OPD yang melaksanakan urusan pariwisata	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	500.000	1	1.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	5	901.500.000		
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	500.000	10	700.000	13	-	15	140.789.000	17	140.789.000	20	140.789.000	82	423.567.000		
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	500.000	10	1.000.000	13	808.535.050	15	808.535.050	17	808.535.050	20	808.535.050	82	3.235.640.200		
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				12.720.671		15.500.000		24.780.669.275		16.364.193.786		16.364.193.786		16.364.193.786		37.655.603.757		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	47.92	47.92	1.200.000	48.88	2.000.000	49.86	7.193.894.567	50.85	7.193.894.567	51.87	7.193.894.567	52.91	7.193.894.567	52.91	28.778.778.268	OPD yang melaksanakan urusan pertanian	
		persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47.92	47.92		48.88		49.86		50.85		51.87		52.91		52.91			
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Indeks Pertanaman per tahun (kali)	2,3	2,31	5.000.000	2,33	5.500.000	2,36	8.669.689.400	2,38	8.669.689.400	2,40	8.669.689.400	2,43	8.669.689.400	2,43	7.000.000		
		Persentase ternak unggul	6,5	7,0		4,5		5,0		5,5		6,0		6,5		6,5			
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	18	150	1.500.000	140	1.700.000	130	225.309.819	120	225.309.819	110	225.309.819	100	225.309.819	100	3.750.000		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian	100	100	170.671	100	1.150.000	100	109.500.000	100	109.500.000	100	109.500.000	100	109.500.000	100	1.500.000		
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha	30,47	180	350.000	190	400.000	200	-	210	75.000.000	220	75.000.000	230	75.000.000	230	650.000		
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	n.a	25	4.500.000	50	4.750.000	75	8.582.275.489	100	90.800.000	125	90.800.000	150	90.800.000	150	8.863.925.489		
		Jumlah Kelompok Ternak yang naik kelas	n.a	25		50		75		100		125		150		150			
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.832.759		11.098.050		3.040.178.261		3.170.178.261		3.170.178.261		3.170.178.261		12.571.643.853		
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan/usaha yang memiliki izin WSTP	5	10	50.000	15	50.000	20	-	25	105.000.000	30	105.000.000		105.000.000	30	315.100.000	OPD yang melaksanakan urusan perdagangan	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan omset perdagangan	1,5	1,5	9.402.196	2,3	10.037.800	2,5	2.764.178.133	2,6	2.764.178.133	2,7	2.764.178.133	2,8	2.764.178.133	12	11.076.152.528		
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan omset perdagangan	1,5	1,5	147.064	2,3	235.250	2,5	30.000.109	2,6	30.000.109	2,7	30.000.109	2,8	30.000.109	12	120.382.750		
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset perdagangan	n/a	n/a		2,3	50.000	2,5	-	2,6	25.000.000	2,7	25.000.000	2,8	25.000.000	12	75.050.000		
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan omset perdagangan	1,5	1,5	233.499	2,3	450.000	2,5	202.000.000	2,6	202.000.000	2,7	202.000.000	2,8	202.000.000	12	808.683.499		
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset perdagangan	n/a	n/a	-	2,3	275.000	2,5	44.000.019	2,6	44.000.019	2,7	44.000.019	2,8	44.000.019	12	176.275.076		
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				15.545.824		1.937.760		18.037.455.300		18.039.910.570		18.039.910.570		18.039.910.570		72.174.670.594		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2	15.545.824	2	1.617.760	2,2	18.002.455.270	2,5	10.002.455.270	2,7	10.002.455.270	3,5	10.002.455.270	3,5	48.026.984.664	OPD yang melaksanakan urusan perindustrian	
		Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2		2,35		2,68		4,85		6,04		6,7		6,7	-		
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2		2	110.000	2,2	-	2,5	8.002.455.270	2,7	8.002.455.270	3,5	8.002.455.270	3,5	24.007.475.810		

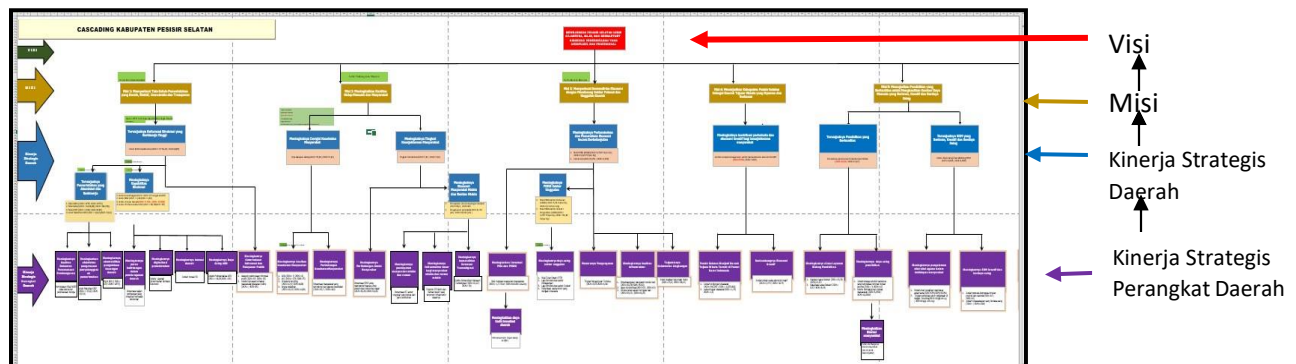
Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					target (a)	Rp.000 (b)	target (c)	Rp.000 (d)	target (e)	Rp.000 (f)	target (g)	Rp.000 (h)	target (i)	Rp.000 (j)	target (k)	Rp.000 (l)	target (m)	Rp.000 (n)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2		2,35		2,68		4,85		6,04		6,7		6,7	-	OPD yang melaksanakan urusan transmigrasi	
				Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2	210,000	2,2		2,5	35,000,030	2,7	35,000,030	2,7	35,000,030	3,5	35,000,030	3,5	140,210,120		
				Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2		2,35		2,68		4,85		6,04		6,7		6,7	0		
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1,800,000		2,100,000		121,624,523		371,624,523		371,624,523		371,624,523		1,240,398,092	OPD yang melaksanakan urusan transmigrasi	
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Facilitasi HPK menjadi APL untuk transmigrasi lokal	n/a	1	100,000	1	100,000	1	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	300,200,000		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pemukiman transmigrasi yang di fasilitasi pembangunannya	n/a	2	200,000	2	250,000	2	-	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	450,450,000		
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	n/a	10	1,500,000	15	1,750,000	20	121,624,523	25	121,624,523	30	121,624,523	35	121,624,523	35	489,748,092		
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				57,318,633		64,954,685		24,394,589,908		24,527,234,455		24,527,234,455		24,527,234,455		97,798,566,589		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				38,276,741		42,104,415		3,529,158,758		3,561,803,305		3,561,803,305		3,561,803,305		14,294,949,827	OPD yang melaksanakan unsur sekretariat daerah	
4	01	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran	17.03	18.00	24,526,331	20.00	26,978,964	21.00	-	22.00	32,644,547	23.00	32,644,547	24.00	32,644,547	24.00	149,438,935		
				Nilai SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja	10.97	11.50		12.00		12.50		13.00		13.50		14.00		14.00			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pencapaian target kinerja lingkup kesejahteraan sosial dan masyarakat			12,844,122		14,128,535		3,005,200,043		3,005,200,043		3,005,200,043		3,005,200,043		12,047,772,829		
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindak lanjuti			906,287		996,916		523,958,715		523,958,715		523,958,715		523,958,715		2,097,738,063		
4	02		SEKRETARIAT DPRD				19,041,892		22,850,270		20,865,431,150		20,965,431,150		20,965,431,150		20,965,431,150		83,503,616,762		
4	02	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA								0		1000000000		1000000000		1000000000			OPD yang melaksanakan unsur sekretariat DPRD	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program kerja DPRD yang terealisasi sesuai dengan fungsinya	50	55	19,041,892	60	22,850,270	65	20,865,431,150	70	20,865,431,150	75	20,865,431,150	80	20,865,431,150	80	83,503,616,762		
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				280,441,392		311,111,721		229,581,926,479		229,581,926,479		229,581,926,479		229,581,926,479		239,901,321,385		
5	01		PERENCANAAN				1,437,644		1,286,944		648,862,010		648,862,010		648,862,010		648,862,010		2,602,166,528	OPD yang melaksanakan unsur perencanaan	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja	21.96	23	714,211	25	514,211	26	524,997,174,00	27	524,997,174,00	27.5	524,997,174,00	28	524,997,174,00	28	2,101,217,119		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Perangkat daerah yang selaras dengan Perencanaan Daerah	100	100	723,332	100	766,732	100	124,864,836	100	124,864,836	100	124,864,836	100	124,864,836	100	500,949,409		
5	02		KEUANGAN				277,122,712		307,824,330		227,747,270,104		227,747,270,104		227,747,270,104		227,747,270,104		232,556,089,813	OPD yang melaksanakan unsur keuangan	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang terbit dalam pengelolaan keuangan	100	100	275,199,303	100	305,703,289	100	226,031,469,637	100	226,031,469,637	100	226,031,469,637	100	226,031,469,637	100	230,577,099,030		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang terbit dalam penatalaksanaan BMD	100	100	1,085,251	100	1,115,251	100	399,998,884	100	399,998,884	100	399,998,884	100	399,998,884	100	400,028,884		
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	0.02	0.02	838,158	1.61	1,005,790	1.74	1,315,801,583	1.87	1,315,801,583	2.01	1,315,801,583	2.16	1,315,801,583	2.16	1,578,961,900	OPD yang melaksanakan unsur kepegawaian	
5	03		KEPEGAWAIAN				1,672,771		1,756,410		1,134,794,482		1,134,794,482		1,134,794,482		1,134,794,482		4,542,607,110		
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Kompetensi jabatan dengan Anjab	50	55	1,672,771	60	1,756,410	65	1,134,794,482	79	1,134,794,482	75	1,134,794,482	80	1,134,794,482	80	4,542,607,110		
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,920,481		2,016,505		91,361,825		91,361,825		91,361,825		91,361,825		369,384,286	OPD yang melaksanakan unsur pendidikan dan pelatihan	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata rata lamanya PNS mendapatkan pengembangan kompetensi	10.8	10,8	1,920,481	15	2,016,505	18	91,361,825	20	91,361,825	25	91,361,825	30	91,361,825	30	369,384,286		
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				208,365		250,038		49,999,883		49,999,883		49,999,883		49,999,883		200,457,934		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD	84.5	87	208,365	89.5	250,038	91/5	49,999,883	93	49,999,883	94	49,999,883	95	49,999,883	95	200,457,934	OPD yang melaksanakan unsur penelitian dan pengembangan	
			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				1,566,723		1,820,068		1,373,777,087		1,373,777,087		1,373,777,087		1,373,777,087		5,498,495,139	Inspektorat Daerah	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				1,566,723		1,820,068		1,373,777,087		1,373,777,087		1,373,777,087		1,373,777,087		5,498,495,139		
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	6.94	7.2	1,266,723	7.8	1,520,068	8.3	1,373,777,087	8.7	1,373,777,087	9.1	1,373,777,087	9.4	1,373,777,087	9.4	5,497,895,139		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJUKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tindak lanjut temuan jumlah temuan BPK	9.98	11		12.5		14	57284750	15.5	57284750	17	57284750	18.5	57284750	18.5			
					100	100	300,000	100	300,000	100		100		100		100		100	600,000		
			Unsur Kewilayahan				2,037,000		2,152,000		171,516,180		184,529,450		184,529,450		142,391,750		687,155,830		
7	01		KECAMATAN				2,037,000		2,152,000		171,516,180		184,529,450		184,529,450		142,391,750		687,155,830	Kecamatan	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	80	81.5	382,000	82.5	412,000	83.5	17,747,260	84.5	19,878,460	85	19,878,460	85	19,878,460	85	78,176,640		
				Persentase LDS yang aktif	60	50		60		65		70		75		80		80			
				persentase mesjid yang melaksanakan subuh berjemaah	N/A	N/A		30		35		40		45		50		50			
				Jumlah Remaja Mesjid yang aktif	N/A	N/A		20		25		30		35		40		40			
				Jumlah Majelis Ta'lim yang aktif	50	60		65		70		75		80		85		85			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	40	45	650,000	50	665,000	55	88,210,730	60	83,390,730	65	83,390,730	65	52,391,030	65	308,698,220		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Tranitibum yang dapat diselesaikan	80	85	212,000	90	227,000	95	2,797,930	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	21,236,930		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000		target	Rp.000		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan	70	75	463,000	80	478,000	95	49,668,995	100	47,168,995	100	47,168,995	100	47,168,995	100	192,116,980	OPD yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	90	95	325,000	100	340,000	100	13,091,265	100	13,091,265	100	13,091,265	100	1,953,265	100	41,892,060		
			Jumlah penetapan kawasan pedesaan yang di fasilitasi	1	1	5,000	2	30,000	2		2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	45,035,000			
Unsur Pemerintahan Umum							4,110,000		4,235,000		1,133,394,022		1,354,194,022		1,354,194,022		1,354,194,022		5,204,321,088		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4,110,000		4,235,000		1,133,394,022		1,354,194,022		1,354,194,022		1,354,194,022		1,354,194,022			5,204,321,088
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang meningkat wawasan kebangsaannya	0	500 org	525,000	500 org	535,000	500 org	-	500 org	70,000,000	500 org	70,000,000	500 org	70,000,000	500 org	211,060,000		
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahaman politik kalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	75%	85%	1,535,000	85%	1,605,000	85%	1,036,352,851	85%	1,036,352,851	85%	1,036,352,851	85%	1,036,352,851	85%	4,148,551,404		
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	42 ormas	46 ormas	300,000	53 ormas	330,000	63 ormas	-	73 ormas	90,800,000	83 ormas	90,800,000	83 ormas	90,800,000	83 ormas	273,030,000		
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75%	85%	1,160,000	85%	1,175,000	85%	0	85%	60,000,000	85%	60,000,000	85%	60,000,000	85%	182,335,000		
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang ditangani	100%	100%	590,000	100%	590,000	100%	97,041,171	100%	97,041,171	100%	97,041,171	100%	97,041,171	100%	389,344,684		
TOTAL							1,859,481,372		1,911,695,333		1,635,446,315,136		1,658,913,045,506		1,674,187,225,759		1,687,415,898,569		5,943,869,856,484		

4.3. Review Indikator Kinerja Utama

RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 52 (lima puluh dua) IKU yang berasal dari kerangka pohon kinerja sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Gambar tersebut berjudul Cascading Kabupaten Pesisir Selatan. Hubungan yang terlihat adalah hubungan kerangka logis untuk menunjukkan kerangka pikir dan tahapan pemerintah untuk mencapai Visi, melalui indikator - indikator kinerja yang disusun berhirarki (bertingkat).

Visi diukur dengan menggunakan sebuah indikator kinerja yang paling tinggi (hirarki pertama) yang akan dicapai melalui indikator-indikator kinerja yang mewakili lima Misi (hirarki kedua). Kelima Misi akan dapat diwujudkan apabila tercapai indikator - indikator Kinerja Strategis Daerah (hirarki ketiga). Selanjutnya indikator kinerja strategis daerah akan terwujud apabila indikator-indikator kinerja strategis perangkat daerah (hirarki keempat) terwujud.



Gambar 2. Hubungan logis yang dibangun dalam Cascading Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026

Jumlah IKU sebanyak 52 (limapuluh dua) di dalam dokumen RPJMD 2021-2026 adalah jumlah semua indikator yang ditetapkan untuk semua tingkat kinerja untuk mencapai visi. Namun sesungguhnya, tidak semua indikator tersebut harus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), karena ada indikator yang sangat bersifat teknis dan merupakan kinerja yang harus diwujudkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai indikator kinerja perangkat daerah. Tabel 2 menyajikan hasil review terhadap IKU RPJMD 2021-2026 Kabupaten pesisir Selatan.

Tabel 6. Hasil review penggunaan indikator kinerja utama dan indikator kinerja OPD terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penyesuaian	
			Kinerja Utama Daerah	Kinerja OPD
1.	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	V	
2.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	V	
3.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	V	
4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	V	
5.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	V	
6.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	V	
7.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	V	
8.	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	V	
9.	Indeks SPBE	tanpa satuan	V	
10.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	V	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penyesuaian	
			Kinerja Utama Daerah	Kinerja OPD
11.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	V	
12.	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	V	
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	V	
14.	Usia Harapan Hidup	tahun	V	
15.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup		V
16.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup		V
17.	Prevalensi stunting	persen		V
18.	Angka Kesakitan	persen		V
19.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen		V
20.	Tingkat Kemiskinan	persen	V	
21.	Indeks Gini	tanpa satuan	V	
22.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen		V
23.	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen		V
24.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	V	
25.	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	V	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penyesuaian	
			Kinerja Utama Daerah	Kinerja OPD
26.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rupiah		V
27.	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Triliun Rupiah		V
28.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rupiah		V
29.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	V	
30.	Rasio Konektivitas	persen		V
31.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen		V
32.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen		V
33.	Indek kualitas lingkungan hidup	Tanpa satuan	V	
34.	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang		V
35.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang		V
36.	Lama tinggal wisatawan	hari		V
37.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rupiah		V
38.	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen		V
39.	Harapan Lama Sekolah	tahun		V
40.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun		V
41.	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang		V

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penyesuaian	
			Kinerja Utama Daerah	Kinerja OPD
42.	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	V	
43.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan		V
44.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen		V
45.	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan		V
46.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang		V
47.	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	orang		V
48.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	V	
49.	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen		V
50.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen		V
51.	Jumlah nagari Tangguh bencana	nagari	V	
52.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan		V

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 2 di atas, ada 29 (dua puluh sembilan) indikator yang diidentifikasi berada pada level indikator kinerja OPD. Artinya hanya 23 (dua puluh tiga) indikator yang merupakan indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (IKU).

4.4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah - RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya hasil review di atas digunakan untuk menganalisis IKU berdasarkan target dan capaian tahun 2021. Data capaian tahun berjalan (tahun 2022) belum diperoleh untuk digunakan dalam analisis. Beberapa catatan terhadap evaluasi IKU adalah seperti Tabel 3 berikut.

Tabel 7. Analisis IKU Daerah

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
1.	Pertumbuhan Ekonomi	IKU ini bernilai kinerja rendah karena tahun 2021 pemerintah daerah masih mengalami dampak pandemic yang berdampak pada menurunnya produktivitas daerah. Namun demikian, walaupun target th 2022 lebih rendah dibanding realisasinya, namun target 2023-2026 sudah rasional.	Target tetap
2.	a. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Skor Nilai LPP	IKU daerah penting mendapat perhatian pemerintah secara komprehensif karena kinerjanya sangat ditentukan oleh komitmen OPD terkait.	Komponen penilaian IKU terintegrasi perlu didukung setiap OPD secara efektif
3.	a. Level maturitas SPIP Pemda b. Indeks Kelembagaan c. Indeks Kebahagiaan	IKU yang selama ini dinilai oleh Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat atau pemerintah provinsi) menjadikan pemerintah daerah Kabupaten sulit menjamin baiknya kinerja, karena capaiannya diukur dengan instrumen pengukuran indikator yang tidak disiapkan pemda kabupaten. Sementara,	Pemerintah Daerah perlu memahami dan mempelajari instrument yang dipakai, sehingga menyiapkannya sejak awal tahun pembangunan dilaksanakan

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
4.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terdapat kesalahan penulisan pada target atau realisasi 2021, setelah diklarifikasi perlu direvisi. Tertulis capaian tahun 2021 sebesar 66.88, seharusnya 68.72	Perlu cek dan ricek oleh setiap OPD untuk setiap penetapan data kuantitatif pada kondisi awal dan target yang akan ditetapkan, berdasarkan analisis yang matang dan data yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan
5.	Indeks SPBE	Tertulis target tahun 2021 sebesar 3,2 seharusnya 3.12. Skala penilaian Indeks SPBE berkisar dari 2,6-3,5 tergolong kategori Baik. Nilai maksimal adalah 5. Dengan demikian Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan berada dalam kategori baik dan tahun 2021 menjadi yang terbaik di Prov. Sumbar dan peringkat 6 tingkat nasional. Dinas KOMINFO optimis menaikkan nilai target Indeks SPBE pada tahun 2022 menjadi 3.40, tahun 2023 menjadi 3.55, tahun 2024 menjadi 3.75, tahun 2025 menjadi 3.95 dan pada tahun 2026 menjadi 4.00. Hal tersebut didasarkan kepada telah tersedianya arsitektur SPBE pada tahun 2023. Sebab tersedianya arsitektur SPBE memberikan kontribusi yang besar, terhadap peningkatan nilai secara keseluruhan	Perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2023-2026 karena sesuai dengan optimisme dan kemampuan OPD terkait

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
6.	Indeks profesionalitas ASN	<p>IKU tidak mencapai kinerja yang memuaskan hanya karena tidak mampu melengkapi persyaratan adminstrasi sebagai bukti kinerja, sehingga kinerja tergolong sangat rendah (<50%). Bukti administratif tersebut antara lain berupa sertifikat pelatihan atau kegiatan kompetensi dan profesional yang diikuti. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya (Peraturan BKN Nomor 8/ 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara). Rincian butir indikator penilaian adalah: (1.) Disiplin (5%); (2.) Kualifikasi pendidikan (25%); (3.) Kompetensi (40%); (4.) Kinerja (30%).</p> <p>Range penilaian: sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60). Berdasarkan hal-hal diatas maka BKPSDM melakukan penurunan target capaian untuk tahun 2023 menjadi 58, tahun 2024 menjadi 59, tahun 2025 menjadi 60 dan pada tahun 2026 menjadi 62.</p>	Target tidak perlu diturunkan karena hanya memerlukan kelengkapan pembuktian kinerja secara adminsitratif untuk meningkatkannya.

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
7.	IKU keterbukaan informasi publik	IKU ini tidak mencapai kinerja yang memuaskan karena perubahan aplikasi, sehingga perlu penyesuaian data yang dibutuhkan. Range penilaian untuk kategori keterbukaan informasi publik senilai 91-100 berada dikategori informatif. Pada tahun 2021 nilai kategori keterbukaan informasi publik Pesisir Selatan berada di angka 97. Untuk merasionalisasikan target IKU RPJMD pada tahun 2023 kominfo menurunkan target menjadi 94, tahun 2024 menjadi 95, tahun 2025 menjadi 96, dan pada tahun 2026 menjadi 97. Penurunan target ini didasarkan oleh terjadinya perubahan aplikasi yang digunakan. Sampai dengan tahun 2021, Pesisir Selatan menggunakan aplikasi Satu Data Pesisir Selatan (Sinar Pessel) yang merupakan aplikasi hasil pengembangan sendiri. Pada 2022 kabupaten/kota diharuskan menggunakan aplikasi satu data dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya dikhawatirkan terjadi penurunan nilai capaian secara keseluruhan	Target tidak perlu diturunkan karena perubahan aplikasi tidak merubah secara signifikan komponen / unsur yang dinilai
8.	IKU indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Target IKU ini terlalu rendah dari kemampuan capaian. Namun FGD mengungkap kekhawatiran OPD meningkatkan target karena capaian indeks tersebut hanya diukur pada 3 sampel OPD yang melakukan pelayanan publik saja	Perlu kerjasama antar OPD untuk penyediaan data yang akurat, dipercaya dan dilakukan secara kontiniu supaya

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
		(Rumah Sakit M. Zein, BKPSDM, dan Dinas DUKCAPIL). Apabila diukur kinerja untuk semua OPD yang melakukan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan, diperkirakan belum akan mencapai nilai kinerja yang baik.	data selalu update. Selain itu juga perlu peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis OPD dalam penggunaan metoda pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
9.	IKU indeks lingkungan hidup	IKU ini mengalami perubahan formulasi untuk skor penilaian. Perubahan formulasi ini menyebabkan angka Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2021 menurun. Untuk target ditahun 2023 hingga tahun 2026, dinas Perkimtan LH melakukan penyesuaian target yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Berdasarkan surat edaran ini maka target dinas perkimtan LH menjadi sebagai berikut; tahun 2022 menjadi 72.45, tahun 2023 menjadi 72.76, tahun 2024 menjadi 73.07, tahun 2025 menjadi 73.38 dan pada tahun 2026 menjadi 73.69.	Target disesuaikan dengan formula yang baru.
10.	IKU nagari tangguh bencana	IKU ini ternyata hanya diukur dengan terbentuknya KSB (Kelompok Siaga Bencana) di	Kriteria Nagari pratama perlu dikaji juga dari

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran
		Nagari pada tahun 2016-2017, pada 182 nagari sebagai nagari Pratama. Namun sampai dengan tahun 2021, KSB tersebut sudah tidak aktif. Tahun 2022, tinggal 45 nagari yang berstatus Pratama. Oleh sebab itu BPBD melakukan rasionalisasi jumlah nagari tangguh bencana sbb: tahun 2023: 67 nagari pratama, tahun 2024: 87 nagari pratama, tahun 2025: 107 nagari pratama, tahun 2026: 127 nagari pratama.	ketangguhan secara ekonomi dan sosial dalam mengatasi kebencanaan. Terbentuknya KSB perlu dilengkapi dengan kemampuan KSB untuk mengelola dirinya sendiri dalam menghadapi kebencanaan.

Hasil analisis dan rasionalisasi terhadap Target tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah Berdasarkan Hasil Review

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
1.	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,06	70,03	99,96	masih relevan	-	Target tahun 2023-2026 tetap
2.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,55	3,37	132,16	Walaupun target th 2022 lebih rendah dibanding realisasi nya, namun target 2023-2026 sudah rasional	-	Target tahun 2023-2026 tetap
3.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	56 (CC)	56 (CC)	100,00	masih relevan	-	Target tahun 2023-2026 tetap
4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	100,00	masih relevan	-	Target tahun 2023-2026 tetap
5.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	68 (B)	66,88 seharusnya 66,67 (B)	98,12	Justifikasi peningkatan target akuntabilitas kinerja instansi yang cukup tinggi	Penetapan target baru dalam rangka rasionalisasi, perlu peran serta lintas instansi, sebab penilaian	Target tahun 2023-2026 tetap

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
						mengingat capaian 2021 dibawah target	AKIP merupakan akumulasi dari 5 komponen penilaian yakni; a. Perencanaan kinerja: Bapedalitbang b. Pengukuran Kinerja: Bapedalitbang c. Pelaporan Kinerja: Bagian Organisasi d. Evaluasi Kinerja: Inspektorat e. Capaian Kinerja: Tim + OPD	
6.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209	100	Perlu justifikasi peningkatan target LPPD berdasarkan	Skor Nilai LPPD terakhir dinilai pada tahun 2019. Setelah tahun 2019,	Target 2023-2026 tetap

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
						n capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk capaian kinerja makro, penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	penilaian tidak lagi dilakukan oleh instansi dari Pusat. Penetapan target dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan indikator kinerja yang ditetapkan pada Permenpan & RB. Indeks dihitung misalnya berdasarkan rata-rata hasil survei misalnya pada dua tingkatan organisasi tertinggi, dst.	
7.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3	3	100	Masih relevan	Penilaian bukan oleh pemda kabupaten	Target 2023-2026 tetap
8.	Indeks	tanpa	P-3	P-3	100	Masih	Data indeks	Target 2023-

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
	Kelembagaan	satuan	(Cukup efektif)	(Cukup efektif)		relevan	kelembagaan belum tersedia disebabkan belum adanya formula penilaian dari provinsi. Sampai saat ini provinsi belum melakukan penilaian untuk Indeks Kelembagaan.	2026 tetap
9.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,2 seharusnya 3,12	3,34	107,05	masih relevan	Cakupan layanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan telah terselenggaranya aplikasi SIPD, E-SAKIP, dan telah terinteroperabilitasnya	Target 2023-2026 tetap

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							aplikasi SINAR PESEL dengan aplikasi SIMDUK Dinas DUKCAPIL. Aplikasi SINAR dan PPID milik Pesisir Selatan saat ini juga telah direplikasi oleh beberapa kabupaten di Sumatera Barat.	
10.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	57	48,78	85,58	Penetapan target jauh diatas capaian dan terus meningkat sangat tinggi terutama tahun 2023-2026	Capaian tahun 2021 menjadi rendah karena BKPSDM tidak mampu membuktikan kinerja secara administratif, a.l. sertifikat pelatihan. Target	Sebaiknya target 2023-2026 tetap, dengan memenuhi kelengkapan berkas administratif sebagai bukti kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							diminta untuk diturunkan: tahun 2023 menjadi 58, tahun 2024 menjadi 59, tahun 2025 menjadi 60 dan pada tahun 2026 menjadi 62.	
11.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93 informatif	97 informatif	104,30 informatif	Target terlalu rendah, sementara capaian sudah sangat baik. Seharusnya target tidak diturunkan.	Penurunan target ini didasarkan pada perubahan aplikasi yang digunakan. Sampai dengan tahun 2021, Pesisir Selatan menggunakan aplikasi Satu Data Pesisir Selatan (Sinar Pessel) yang merupakan aplikasi	Sebaiknya target 2023-2026 tetap dengan memenuhi kriteria penilaian yang selama ini sudah menunjukkan kinerja baik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							hasil pengembangan sendiri. Pada 2022 kabupaten/kota diharuskan menggunakan aplikasi satu data dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya dikhawatirkan terjadi penurunan nilai capaian secara keseluruhan.	
12.	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	5,150	49,34	Telah mencapai Inovativ	Skor penilaian berubah	Karena diberlakukan penyesuaian skor target dengan indikator Juknis yang baru, terjadi perubahan skor range	Target disesuaikan dengan sistem penilaian skor baru: tahun 2022: 60.02, tahun 2023: 62.32, tahun 2024: 62.52, tahun 2025: 62.72

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							nilai IID menjadi 0 s.d 100. Kategori Tidak inovatif 0, kurang inovatif 0,01-34,99, Inovatif 35,00 - 60,00, Sangat Inovatif 60,01-100.	dan tahun 2026: 62.82.
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	80,00	83,65	104,56	Target terlalu rendah	Sampel mengukur pelayanan publik hanya pada 3 OPD (Rumah Sakit M. Zein, BKPSDM, dan Dinas DUKCAPIL) saja, belum semua OPD yang melakukan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.	Target 2023-2026 tetap, dengan catatan: metoda pengukuran kinerja perlu ditingkatkan dengan sumber data semua OPD pelayanan publik.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
14.	Usia Harapan Hidup	tahun	71,04	70,96	99,89	Kinerja perlu ditingkatkan	Perlu kerjasama yang lebih baik antar OPD untuk kinerja peningkatan AHH dengan akurasi data yang lebih tinggi	Target 2023-2026 tetap
15.	Tingkat Kemiskinan	persen	7,55	7,92	95,33	Kinerja perlu ditingkatkan	Perlu kerjasama yang lebih baik antar OPD untuk kinerja penurunan tingkat kemiskinan dengan akurasi data yang lebih tinggi	Target 2023-2026 tetap
16.	Indeks Gini	tanpa satuan	0,25	0,253	98,81	Kinerja perlu ditingkatkan	Tujuan misi ke-3: Semakin menurunnya tingkat ketimpangan dengan mempertahankan Indeks Gini di	Target 2023-2026 tetap

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							0,233 pada tahun 2026. Perlu peningkatan kinerja	
17.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/ thn	9.212.000	9.270.000	100,63	masih relevan		Target 2023-2026 tetap
18.	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	9,711	9,79	100,81	masih relevan	gunakan nilai PDRB (ADHK) saja, sehingga sektor pertanian dan industri tdk perlu dimasukan	Target 2023-2026 tetap
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,93	5,97	116,08	masih relevan		Target 2023 - 2026 tetap
20.	Indek kualitas lingkungan hidup	Tanpa satuan	86,74	75,8	87,39	Capaian jauh dibawah target sedangkan target tahun berikutnya terus ditingkatkan	Rendahnya capaian tahun 2021 disebabkan adanya perubahan formulasi perhitungan Indek kualitas lingkungan hidup. Untuk target	Target disesuaikan dengan formulasi penilaian baru: tahun 2022: 72.45, tahun 2023: 72.76, tahun 2024: 73.07, tahun 2025: 73.38 dan pada

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							ditahun 2023 hingga tahun 2026, dinas Perkimtan LH melakukan penyesuaian target yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.	tahun 2026: 73.69.
21.	Indeks Daya Saing Daerah bidang	tanpa satuan	3,15 Tinggi	3.00 Tinggi	95.23	Masih relevan	sudah masuk kategori tinggi	Target 2023 - 2026 tetap tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
	SDM							
22.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	68,42	-	-	Masih relevan	Penilaian tidak dilakukan pemerintah daerah	Target 2023 - 2026 tetap
23.	Jumlah nagari Tangguh bencana	nagari	182 Pratama	34 Pratama	18,68	Capaian jauh dibawah target, namun penetapan target tahun-tahun berikutnya masih tinggi	Indikator Nagari Pratama adalah Nagari yang memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang dibentuk tahun 2016-2017. Namun tahun 2021, KSB tersebut sudah tidak aktif. Tahun 2022, tinggal 45 Nagari yang berstatus nagari tangguh bencana (pratama).	Penyesuaian target: tahun 2023: 67 nagari Pratama; tahun 2024: 87 nagari Pratama; tahun 2025: 107 nagari pratama; dan tahun 2026: 127 nagari pratama.
			0 Madya	0 Madya				
			0 Utama	0 Utama				

Hasil review terhadap indikator kinerja OPD juga dianalisis berdasarkan hasil capaian dan target yang ditetapkan RPJMD 2021-2026 sebagaimana disajikan Tabel 5.

Tabel 9. Analisis Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran/Rekomendasi
1.	a. Angka kematian bayi b. Angka kematian ibu c. Prevalensi stunting d. Angka kesakitan e. Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	<p>Indikator untuk kinerja OPD yang terkait sektor kesehatan terlihat agak sulit untuk dijelaskan datanya, baik untuk penetapan target maupun realisasi. Dalam beberapa pertemuan FGD juga belum ditemukan keyakinan terhadap data karena cara pengukuran yang kurang dipahami stakeholders.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengapa target angka kematian bayi selalu ditetapkan 8, sementara capaiannya tahun 2021 diatas 100%. - Mengapa angka kematian ibu meningkat sangat tajam, mencapai 172 tahun 2021, sementara tahun sebelumnya adalah 100. Apa kejadian yang menyebabkannya begitu tinggi angka kematian ibu dalam 1 tahun tersebut. - Berapa sesungguhnya data stunting sehingga targetnya tidak dibuat optimis? - Angka kesakitan mengapa 	<p>Perlu pendataan yang lebih akurat, data yang lebih terbuka dengan susunan kriteria yang jelas untuk pengukuran indikator kinerja dimulai dari pelaksana satuan kerja tingkat desa/nagari, sehingga datanya valid</p>

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		<p>tidak mencapai kinerja yang baik melebihi target?</p> <p>- Apa masalahnya sehingga kinerja persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatannya hanya 86,27%?</p>	
2.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	<p>IKU ini apabila ditargetkan selalu meningkat dikhawatirkan akan dapat menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tetapi dari sisi lain, jumlah PPKS yang menerima selalu meningkat juga dapat diartikan bahwa bantuan itu memang mencapai sasarannya, yakni mendekati semua PPKS.</p> <p>Bantuan untuk PPKS di Pesisir Selatan 90% ternyata berasal dari pusat. Hasil capaian di tahun 2021 sebesar 65,28 - lebih tinggi dari target, disebabkan banyaknya kejadian bencana alam dan pandemik Covid-19, sehingga menyebabkan banyaknya bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Target capaian untuk</p>	Perlu kecermatan penilai dan menggunakan pola pemberdayaan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		Tahun 2022 tidak dilakukan rasionalisasi.	
3.	Pencapaian skor pola pangan harapan	Nilai Pencapaian skor pola pangan harapan pada tahun 2019 dinilai baik sebesar 86,4. Namun akibat dari pandemi covid 19 angka tersebut turun secara signifikan di tahun 2020 menjadi 81,7. Hal ini akibat dari dampak Covid 19 menyebabkan jumlah asupan kalori makanan masyarakat dibawah standar normal. Juga dipengaruhi rendahnya daya beli masyarakat, naiknya harga pangan, akses pangan yang terbatas, banyaknya pengangguran, dan terjadi pengurangan pendapatan.	dilakukan rasionalisasi IKU RPJM pada indikator pencapaian skor pola pangan harapan; tahun 2023 menjadi 82, tahun 2024 menjadi 84, tahun 2025 menjadi 85 dan pada tahun 2026 menjadi 87.
4.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	IKU ini mengalami dualism bentuk pengukuran, sehingga sulit menetapkan penilaian terhadap kinerja yang sedang direview. Menurut Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan OSS, jenis investasi yang dilaporkan adalah semua besaran investasi, dengan nilai ≥ 5 milyar rupiah dan dibawah 5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan. Sementara, Kementerian investasi juga melakukan pendataan terhadap besaran investasi di	Perlu penyesuaian target sesuai usulan OPD terkait: a.

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		daerah, namun nilai investasi yang direkap hanya dengan nilai ≥ 5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan. Target nilai investasi swasta dan masyarakat versi LKPM/OSS: 2022 sebesar 1,95 T, 2023 sebesar 2,1 T, 2024 sebesar 2,3 T, 2025 sebesar 2,5 T, tahun 2026 sebesar 2,75 T. b. Target nilai investasi swasta dan masyarakat versi Kementerian Investasi: tahun 2022 sebesar 556 M, tahun 2023 sebesar 584 M, Tahun 2024 sebesar 613 M, tahun 2025 sebesar 644 M, dan tahun 2026 sebesar 676 M.	
5.	a. Nilai PDRB pertanian (ADHK) b. Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	IKU ini sebenarnya penting untuk melihat sektor yang dominan yang dapat menjadi basis perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun karena capaian tahun 2021 dinilai sangat baik, diatas 100%, seharusnya target tentu bisa dibuat lebih optimistis.	Perlu penyesuaian target tahun 2023-2026 agar lebih rasional dan optimistik sesuai dengan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Selain itu, kinerja ekonomi sektor lainnya juga dapat diukur sebagai IKU OPD terkait agar komposisi perekonomian daerah kabupaten

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
			dapat diukur secara lebih baik dan terbuka.
6.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	<p>Pada IKU ini terdapat kesalahan pendataan tahun 2021, tertulis target 29,55 seharusnya 41,73.</p> <p>IKU ini melihatkan hasil kinerja yang baik, ternyata adalah karena besarnya alokasi pendanaan untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang berasal dari Kementrian PU dan Tata Ruang, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, dana PHJD (Program Hibah Jalan Daerah), dan dari DAU. Sampai dengan tahun 2023 kegiatan peningkatan jalan kabupaten masih menjadi prioritas PUPR. Pada tahun 2023 pemerintah pusat melalui DAU juga akan mengalokasikan dana cukup besar untuk kegiatan PU dan Tata Ruang yang diperkirakan mengungkit angka Persentase jalan kabupaten kondisi baik. Dengan kondisi tersebut maka PUTR melakukan rasionalisasi IKU RPJM pada indikator persentase jalan kabupaten kondisi baik menjadi sebagai berikut; tahun 2022</p>	Dilakukan penyesuaian target sesuai alokasi dana yang juga makin besar dari luar pemerintah Kab Pessel

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		menjadi 44.22, tahun 2023 menjadi 45, tahun 2024 menjadi 46, tahun 2025 menjadi 47 dan pada tahun 2026 menjadi 48.	
7.	a. Proporsi lahan sawah beririgasi baik b. Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Tidak banyak informasi yang dapat diberikan untuk memperjelas ukuran kinerja dan menilai hasil kinerja.	Perlu data yang lebih akurat untuk menetapkan target yang lebih real di masa yang akan datang
8.	a. Jumlah kunjungan wisatawan b. Lama tinggal wisatawan	IKU ini sulit untuk diukur kinerjanya karena datanya belum berasal dari data yang sesungguhnya berpotensi untuk diukur dengan metoda pengukuran yang lebih objektif dan efektif.	Perlu perbaikan formula untuk menghitung jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan sehingga diperoleh angka yang objektif dengan metoda yang lebih efektif
9.	a. Persentase pemenuhan standar pendidikan 8 b. Harapan Lama Sekolah c. Rata-Rata Lama Sekolah	Pasca diterbitkannya PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan, terjadi perubahan indikator persentase pemenuhan 8 standar pendidikan menjadi 3 indikator standar nasional pendidikan, yakni Indeks Literasi, Indeks Numerasi, dan Indeks Karakter. Oleh karena itu indikator	IKU ini perlu penyesuaian pengukuran standard dan capaian dengan berubahnya 8 kriteria sebagai standar pendidikan menjadi 3 kriteria penilaian

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
		<p>kinerja utama pendidikan di RPJMD, diubah dengan memuat ke tiga indikator tersebut. Adapun penyesuaian target untuk masing masing indikator tersebut adalah sebagai berikut; indeks Literasi untuk tahun 2023 adalah 1.80, tahun 2024 adalah 1.90, tahun 2025 adalah 2.00, dan pada tahun 2026 adalah 2.10. Untuk Indeks Numerasi untuk tahun 2023 adalah 1.70, tahun 2024 adalah 1.80, tahun 2025 adalah 1.90, dan pada tahun 2026 adalah 2.00. Sedangkan untuk Indeks Karakter untuk tahun 2023 adalah 2.12, tahun 2024 adalah 2.13, tahun 2025 adalah 2.14, dan pada tahun 2026 adalah 2.15. Saat ini posisi Rapor Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat provinsi berada 2 terbawah sesudah Kabupaten Kepulauan Mentawai</p>	
10.	<p>a. Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi</p> <p>b. Jumlah pemuda berprestasi tingkat</p>	<p>IKU ini tidak dapat menggunakan ukuran satu nilai karena pendidik dan siswa merupakan sumberdaya yang berbeda. Kompetensi dan kebutuhan peningkatan kompetensi untuk berprestasi tentu juga berbeda. Begitu juga</p>	<p>Buat indikator yang terpisah untuk mengukur kinerja pendidik, siswa dan pemuda yang berprestasi. Buat indikator prestasi yang diharapkan untuk</p>

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
	provinsi dan nasional	pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional, membutuhkan data yang berbeda dasar pengukurannya.	ketiganya secara objektif sehingga program yang akan dibuat untuk peningkatan kinerja juga lebih jelas dan lebih baik.
11	a. Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta b. Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	Kedua IKU ini sulit untuk diukur secara objektif karena menyangkut kepada tingkat keimanan dan kesolehan masyarakat. Pembayaran zakat juga memerlukan kriteria yang spesiifik dengan hitungan yang tidak dapat diberlakukan sama kepada semua orang yang bekerja. ASN yang diwajibkan berzakat melalui pemotongan gaji, belum tentu semuanya adalah orang yang wajib membayar zakat. Begitu pula ketika seseorang pergi ke masjid untuk shalat subuh, perlu ditetapkan apa kriteria partisipasinya untuk berjamaah sudah tergolong kriteria yang objektif untuk dihitung.	IKU ini sangat sensitive untuk dijadikan IKU OPD yang secara teknis harus diukur. Disarankan mengganti dengan indikator yang mengukur dampak kesolehan sesorang karena agamanya, misal: keamanan dan kenyamanan penduduk tinggal di daerah.
12	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	IKU ini memeprcayakan datanya kepada laporan masyarakat. Sementara hal ini sangat sensitive untuk diungkap.	Perlu kiat dan teknik pendataan yang yang lebih baik dan terbuka kepada publik

No	IKU yang dianalisis	Analisis	Saran / Rekomendasi
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU ini diukur oleh BPS, dengan kriteria pengukuran yang belum dipahami oleh OPD dan masyarakat	Perlu dibuat sistem pendataan yang terbuka dan terus menerus terpantau bagaimana kesetaraan gender sesungguhnya dipraktekkan dalam kehidupan dan kegiatan pembangunan sehari-hari

Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review sebagai Indikator Kinerja OPD, disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Analisis target dan capaian kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review sebagai Indikator Kinerja OPD

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7,1	112,68	Perlu penyesuaian asumsi apa sehingga target tetap dibuat 8, idealnya target menurun	Tidak ada keterangan	Target tahun 2023-2026 dibuat lebih optimis, tidak stagnan
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	58,14	perlu dikaji mengapa terjadi peningkatan angka kematian, adakah kasus ekstrim terjadi	Tidak ada keterangan	Perlu penyesuaian target 2023 - 2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
						tahun 2021?		
3.	Prevalensi stunting	persen	11,6	11,8	98,31	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target	Tidak ada keterangan	Target 2023 – 2026 tetap
4.	Angka Kesakitan	persen	16,28	16,57	98,25	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target	Tidak ada keterangan	Target 2023 – 2026 tetap
5.	Persentase masyarakat yang	persen	75	64,7	86,27	Kinerja kurang baik,	Tidak ada keterangan	Target 2023 – 2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
	terlindungi hak layanan kesehatan					perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target		
6.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52,54	65,28	124,25	Capaian tahun 2021 jauh melebihi target	Bantuan untuk PPKS ini 90% berasal dari pemerintah Pusat. Capaian tahun 2021 >100% karena banyak penyaluran bantuan bencana alam dan pandemik Covid-19 dari Pusat, bukan	Target 2023 - 2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							Pemda	
7.	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86,5	81,7	94,45	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target	Skor PPH turun tahun 2020 sebagai dampak Covid 19 sehingga asupan kalori makanan masyarakat turun di bawah standar normal, daya beli menurun dengan naiknya harga ² , dan akses pangan menjadi terbatas. Dengan kondisi yang sudah normal, target selanjutnya	Target 2023 - 2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							a diharapkan dapat dicapai.	
8.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rupiah	200.000	1.767.753.325	Tidak dapat dihitung	Penetapan target yang optimistik	Ukuran nilai investasi ada dua versi, yakni versi LKPM / OSS berdasarkan nilai investasi ≥ 5 milyar rupiah dan <5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan. Versi kedua nilai investasi dari Kementerian hanya menghitung investasi	Penyesuaian target 2023-2026: Versi LKPM/OSS; tahun 2023: 2,1 T, tahun 2024: 2,3 T, tahun 2025: 2,5 T; tahun 2026: 2,75 T. Versi Kementerian Investasi: tahun 2023: 584 M, tahun 2024: 613 M, tahun 2025: 644 M; tahun 2026: 676 M.

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							bernilai ≥ 5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan.	
9.	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Triliun Rupiah	3,55	5,56	156,50	kinerja yang baik, capaian jauh melebihi target 2021.	Tidak ada keterangan	Perlu penyesuaian target 2023-2026
10.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rupiah	703,61	1.015,11	144,27	kinerja yang baik, capaian jauh melebihi target 2021.	Tidak ada keterangan	Perlu penyesuaian target 2023-2026
11.	Rasio Konektivitas	persen	55	55	100,00	Masih relevan	Dinas Perhubungan masih melakukan pendataan	Target 2023-2026 tetap

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							ulang dilapangan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022.	
12.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29,55	29,55	100,00	Masih relevan	Data capaian di tahun 2021 direvisi dari 29,55 menjadi 41,73. Besarnya alokasi dana untuk PUPR ternyata mengungkit angka persentase jalan kabupaten kondisi baik secara signifikan .	Pernyesuain target menjadi: tahun 2023: 45; tahun 2024: 46; tahun 2025: 47; tahun 2026: 48.

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
13.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59,05	59,13	100,14	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
14.	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	4700	4800	102,12	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
15.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.000.000	344.197	34,42	Perlu kajian mengapa realisasi rendah sekali dari target	Data capaian hanya berasal dari objek wisata yang berbayar (Carocok, Pulau Setan, Jembatan Akar, Sumedang, Sako, dll (ada 63 Objek wisata).	Perlu penyesuaian target: Tahun 2023: 1.320.000; Tahun 2024: 1.500.000, tahun 2025: 1.650.000; tahun 2026: 1.700.000.

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							Penghitungan kedepan akan ditambah dengan pendataan dari objek wisata tidak berbayar (POKDARWIS).	
16.	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25	1,25	100,00	Bagaimana menghitung lama tinggal, angka tidak realistis 1,25 hari	Perlu perbaikan formulasi untuk menghitung indikator lama tinggal wisatawan sehingga diperoleh angka yang objektif.	Perlu penyesuaian target 2023-2026 dengan rumus yang lebih realistis
17.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rupiah	12	7,2	60,00	Kinerja kurang baik, perlu strateg	7 dari 18 total jenis ekonomi kreatif,	Penyesuaian target: tahun 2023: 20 M;

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
						i yang lebih efektif untuk mencapai target.	ada di Kab. Pesisir Selatan. Target terlaui optimistik.	tahun 2024: 25 M, tahun 2025: 30 M, tahun 2026: 35 M.
18.	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen	10,56	12,72	120,45	masih relevan	Terjadi perubahan indikator persentase pemenuhan 8 standar pendidikan menjadi 3. Sehingga rapor Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat provinsi berada 2 terbawah sesudah Kabupaten Kepulauan	Perubahan IKU - menjadi tiga IKU baru: Indeks Literasi: tahun 2023:1.80, tahun 2024:1.90, tahun 2025:2.00; tahun 2026:2.10. Indeks Numerasi: tahun 2023:1.70, tahun 2024:1.80,

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							Mentawai	tahun 2025:1.90; tahun 2026:2.00. Indeks Karakter: tahun 2023:2.12, tahun 2024:2.13, tahun 2025:2.14; tahun 2026:2.15.
19.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,36	13,33	99,78	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
20.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,29	8,27	99,76	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
21.	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat	orang	4	3	75,00	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif	Tidak ada keterangan	Perlu penyesuaian target 2023-2026, untuk setiap kategori pendidik

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
	provinsi					f untuk mencapai target.		dan siswa
22.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5,9258	5,9258	100	perlu kajian untuk pengukuran yang lebih realistik.	Target belum realistis karena pesimis dalam implementasi (anggaran sangat kecil).	Target 2023-2026 tetap
23.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,4	63	65,35	Kinerja kurang baik, perlu strategi yang lebih efektif untuk mencapai target.	Tidak ada keterangan	Tidak efektif dan tidak objektif untuk ditargetkan

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
24.	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	<10 Rendah	>30 Tinggi	300	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Tidak perlu sebagai indikator kinerja
25.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	100	Target pesimis tik	Tidak jelas berapa target untuk Nasional dan berapa provinsi. Nilai indikator juga stagnan, Peningkatan target ini didasarkan kepada banyaknya even olah raga ditahun tahun kedepan seperti Pekan	Perlu penyesuaian target 2023-2026, untuk setiap kategori nasional dan provinsi

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (persentase)	Hasil review	Keterangan	Rasionalisasi
							Olahraga Provinsi (PORPROV) .	
26.	Jumlah wirausahawan yang berdayasaing	orang	-	-		Kinerja tidak bisa dinilai	Tidak ada keterangan	Tidak dapat ditentukan
27.	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085	0,00053	160	Agar data representatif, perlu penjelasan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
28.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	90,5208	90,533	100	Masih relevan	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap
29.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	56,93	100	Mengapa target dibuat tetap	Tidak ada keterangan	Target 2023-2026 tetap

4.5. Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021-2026

Tabel 11. Rasionalisasi Target kinerja Indikator Utama Daerah berdasarkan Hasil Review

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
1.	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,03	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
2.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,37	4,72	4,65	4,68	4,70	4,72
3.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	56 (CC)	58 (CC)	60 (B)	62 (B)	64 (B)	65 (B)
4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	66,67 (B)	70,00 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	78 (BB)
6.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3215	3223	3229	3234	3240
7.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)
8.	Indeks Kelembag	tanpa satuan	P-3 Cukup	P-3 (Cukuf	P-4 (Efekt	P-4 (Efekt	P-5 (Sanga	P-5 (Sanga

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
	aan		efektif)	Efektif)	if)	if)	t Efektif)	t Efektif)
9.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,34	3,40	3,55	3,75	3,95	34,00
10.	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	48,78	62	71	77	81	85
11.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	97 (informatif)	97 (informatif)	97 (informatif)	98 (informatif)	98 (informatif)	98 (informatif)
12.	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	49,34	60,02	62,32	62,52	62,72	62,82
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	83,65	82.00	84.00	85.00	85.00	85.00
14.	Usia Harapan Hidup	tahun	70,96	71,22	71,39	71,57	71,74	71,9
15.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	7,1	12	12	11	11	10
16.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	172	95	90	85	80	75
17.	Prevalensi stunting	persen	11,8	11,4 (10,92)	11,2 (10,26)	11 (9,65)	10,9 (9,20)	10,8 (8,88)
18.	Angka Kesakita	persen	16,57	15,95	15,67	15,39	15,12	14,84

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
	n							
19.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	64,7	80	85	90	95	100
20.	Tingkat Kemiskinan	persen	7,92	7,2	6,9	6,65	6,45	6,25
21.	Indeks Gini	tanpa satuan	0,253	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
22.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	65,28	53	53,56	54,2	55,04	56,05
23.	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	81,7	87	87,5	88	88,58	89
24.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/ thn	9.270.000	9.325.000	9.369.000	9.534.000	9.734.000	9.949.000
25.	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	9,79	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923
26.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Versi LKPM/OSS Trilyun Rupiah	1.767.753.325	1,95 T	2,1 T	2,3 T	2,5 T	2,75 T

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
27.	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Triliun Rupiah	3.603	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1
28.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rupiah	725,00	735	746	758	771	787
29.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,97	6,85	6,4	5,8	5,2	4,95
30.	Rasio Konektivitas	persen	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59
31.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29,55	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9
32.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59,13	59,2	60,75	62,6	64,6	66,7
33.	Indek kualitas lingkungan hidup	Tanpa satuan	75,8	72,45	72,76	73,07	73,38	73,69
34.	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	4800	5200	5700	6200	6700	7200
35.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	344.197	1.200.000	1.320.000	1.500.000	1.650.000	1.700.000

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
	n							
36.	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5
37.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rupiah	7,2	18	20	25	30	35
38.	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	Indeks literasi	12,72		1,80	1,90	2,00	2,10
		Indeks numerik			1,70	1,80	1,90	2,00
		Indeks karakter			2,12	2,13	2,14	2,15
39.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,33	13,4	13,45	13,49	13,53	13,57
40.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,27	8,32	8,35	8,38	8,4	8,43
41.	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	Pendidik (orang)	3.00	2	3	4	5	6
		Siswa (Orang)		2	4	5	7	8
42.	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,000)	Tinggi (3,200)	Tinggi (3,350)	Tinggi (3,500)	Tinggi (3,650)	Sangat Tinggi (3,800)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
43.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5, 9258	6,643	7,277	7,9741	8,7985	10,0682
44.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	63	96,5	96,6	96,7	96,8	100
45.	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Tinggi (>30 orang)	Rendah (≤10 orang)	Sedang (11 s.d 20 orang)	Sedang (11 s.d 20 orang)	Tinggi (≥21 orang)	Tinggi (≥21 orang)
46.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Nasional (orang)	10	5	7	9	11	13
		Provinsi (orang)		12	15	16	18	20
47.	Jumlah wirausahawan yang berdayasaing	orang	-	500	700	900	1100	1300
48.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan		69,92	71,42	72,92	74,42	75,92
49.	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan	persen	0,00053	0.0008	0.00075	0.0007	0.00065	0.0006

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
	n terhadap jumlah keluarga							
50.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	905330	91,0944	91,7109	92,4139	93,2033	94,0788
51.	Jumlah nagari Tangguh bencana	nagari	Pratama (34)	Pratama (45)	Pratama (67)	Pratama (87)	Pratama (107)	Pratama (127)
			Madya (0)	Madya (0)	Madya (20)	Madya (40)	Madya (60)	Madya (80)
			Utama (0)	Utama (0)	Utama (0)	Utama (20)	Utama (40)	Utama (60)
52.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93

Keterangan:

na: harap diisi dengan rasionalisasi target sesuai analisis yang diberikan

I. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi yang disampaikan di atas dalam rangka rasionalisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021 - 2026, diharapkan hasil rasionalisasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pembangunan tahunan untuk periode 2023-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sangat diperlukan dukungan data dan informasi terkini yang lebih dipercaya dengan sumber data yang valid untuk dapat menjadikan target dan realisasi mencapai kinerja yang baik sesuai yang diharapkan.

Indikator kinerja OPD adalah indikator yang sangat menentukan Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, maka perlu memilih indikator pembangunan yang terdefinisikan dalam pengertian yang jelas, persepsi yang sama, dan dipahami dengan baik. Data tersedia dengan mudah dengan metoda pengumpulan data yang terjangkau, data yang valid dan representatif untuk keseluruhan hasil yang diharapkan. Dengan demikian indikator akan terlihat dan dapat diamati dengan baik. Indikator yang sulit diamati tetapi penting, dapat diganti dengan indikator proksi.

Kebutuhan informasi kinerja akan menggambarkan akuntabilitas sesuai kewenangan, tugas dan fungsi serta peran setiap perangkat daerah dalam mendukung dan mewujudkan visi pembangunan daerah. RPJMD periode 2021 - 2026 ini sekaligus merupakan RPJMD periode terakhir dalam periode RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, RPJMD ini akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang yang dicita - citakan 20 tahun yang lalu.

Diharapkan dengan selesainya dokumen ini, indikator target 2023-2026 menjadi lebih rasional dan lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baik. Rasionalisasi target - target tersebut disusun berdasarkan hasil pemeriksaan kepada OPD terkait dan didiskusikan secara series untuk disepakati. Hal - hal yang belum terakomodasi dalam laporan ini tentu memberi kesempatan untuk kembali membuka diskusi dan melanjutkan analisis, karena

perencanaan memang tidak seharusnya berhenti ketika dokumennya selesai. Semoga bermanfaat untuk kebaikan bersama.

LAMPIRAN

Catatan FGD RASIONALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD dari beberapa kali pertemuan

5. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terdapat perbedaan data capaian target ditahun 2021. Data semula 66.88, sedangkan berdasarkan hasil verifikasi dengan bagian organisasi, capaian target ditahun 2021 adalah 68.72. Penetapan target baru dalam rangka rasionalisasi, perlu peran serta lintas instansi, sebab penilaian AKIB merupakan akumulasi dari 5 komponen penilaian yakni;

- a. Perencanaan kinerja : Bapedalitbang
- b. Pengukuran Kinerja : Bapedalitbang
- c. Pelaporan Kinerja : Bagian Organisasi
- d. Evaluasi Kinerja : Inspektorat
- e. Capaian Kinerja : Tim + OPD

Saran: perlu rapat khusus untuk menetapkan target, dengan menghadirkan OPD-OPD terkait.

6. Skor Nilai LPPD

Skor Nilai LPPD terakhir dinilai pada tahun 2019. Setelah tahun 2019, tidak lagi dilakukan penilaian oleh instansi pusat.

8. Indeks Kelembagaan

Data indeks kelembagaan belum tersedia disebabkan belum adanya formula penilaian dari provinsi. Sampai saat ini provinsi belum melakukan penilaian untuk Indeks Kelembagaan.

9. Indeks SPBE

Terdapat kesalahan penulisan pada target 2021 yang seharusnya 3.12 tertulis 3.2. Skala penilaian Indeks SPBE adalah dari 2.6 sampai dengan >3.5, masuk dalam kategori baik. Nilai maksimal indeks SPBE adalah 5. Pesisir Selatan berada dalam **kategori baik**. Pada penilaian tahun 2021, Pesisir Selatan berada pada peringkat 1 se- Sumatera Barat, dan peringkat 6 se-Indonesia.

Dalam rangka merasionalisasikan IKU RPJMD 2021- 2026, Dinas KOMINFO optimis menaikkan nilai target Indeks SPBE pada tahun 2022 menjadi 3.40, tahun 2023 menjadi 3.55, tahun 2024 menjadi 3.75, tahun 2025 menjadi 3.95 dan pada tahun 2026 menjadi 4.00. Hal tersebut didasarkan kepada telah tersedianya **arsitektur SPBE** pada tahun 2023.

Sebab tersedianya arsitektur SPBE memberikan kontribusi nilai yang besar, terhadap peningkatan nilai secara keseluruhan.

Cakupan layanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan telah terselenggaranya aplikasi SIPD, E-SAKIP, dan telah terinteroperabilitasnya aplikasi SINAR PESEL dengan aplikasi SIMDUK Dinas DUKCAPIL. Aplikasi SINAR dan PPID milik Pesisir Selatan saat ini juga telah direplikasi oleh beberapa kabupaten di Sumatera Barat.

10. Indeks Profesionalitas ASN

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Kontribusi masing-masing indikator terhadap hasil penilaian secara keseluruhan:

1. Disiplin memberi kontribusi 5%
2. Kualifikasi pendidikan memberi kontribusi 25%
3. Kompetensi memberi kontribusi 40%
4. Kinerja memberi kontribusi 30%

Range penilaian IP ASN 0-100, dibagi dalam kategori; sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60).

Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Pesisir Selatan secara penilaian masih dalam kategori sangat rendah, yakni sebesar 48.78. Secara peringkat di Sumatera Barat nilai Indeks Profesionalitas ASN yang terbaik adalah 76.58 oleh Kota Padang Panjang.

Namun angka 48.78 di Kabupaten Pesisir Selatan ini bukanlah angka riil, sebab banyak kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang dilakukan oleh OPD, tidak dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap seperti tidak adanya sertifikat peserta.

Berdasarkan hal-hal diatas maka BKPSDM melakukan penurunan target capaian untuk tahun 2023 menjadi 58, tahun 2024 menjadi 59, tahun 2025 menjadi 60 dan pada tahun 2026 menjadi 62.

11. Kategori keterbukaan informasi publik

Range penilaian untuk kategori keterbukaan informasi publik yakni di 91-100 berada di kategori informatif. Pada tahun 2021 nilai kategori keterbukaan informasi publik Pesisir Selatan berada di angka 97. Untuk

merasionalisasikan target IKU RPJMD pada tahun 2023 kominfo menurunkan target menjadi 94, tahun 2024 menjadi 95, tahun 2025 menjadi 96, dan pada tahun 2026 menjadi 97. Penurunan target ini didasarkan oleh terjadinya perubahan aplikasi yang digunakan. Sampai dengan tahun 2021, Pesisir Selatan menggunakan aplikasi Satu Data Pesisir Selatan (Sinar Pessel) yang merupakan aplikasi hasil pengembangan sendiri. Pada 2022 kabupaten/kota diharuskan menggunakan aplikasi satu data dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya dikhawatirkan terjadi penurunan nilai capaian secara keseluruhan.

12. Indeks Inovasi Daerah

Perlu dilakukan penyesuaian kembali target indikator dengan mempedomani Juknis yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Terutama rangka penilaian dan pemberian penghargaan IGA Tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan Juknis yang baru, terjadi perubahan skor range nilai IID menjadi 0 s.d 100. Kategori Tidak dapat Dinilai 0, kurang inovatif 0,01-34,99, Inovatif 35,00 - 60,00, Sangat Inovatif 60,01-100.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dilakukan penurunan target capaian untuk tahun 2022 menjadi 60.02, tahun 2023 menjadi 62.32, tahun 2024 menjadi 62.52, tahun 2025 menjadi 62.72 dan pada tahun 2026 menjadi 62.82.

13. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Tingkat keakuratan data capaian di tahun 2021 masih diragukan, sebab pengambilan data sampel hanya dilakukan pada 3 OPD (Rumah Sakit M. Zein, BKPSDM, dan Dinas DUKCAPIL) yang melakukan pelayanan publik. Seharusnya untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, sampel diambil dari semua OPD yang melakukan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

15. Angka Kematian Bayi

16. Angka Kematian Ibu

17. Prevalensi stunting

18. Angka Kesakitan

19. Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan

20. Tingkat Kemiskinan (BPS)

21. Indeks Gini

22. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Bantuan untuk PPKS di Pesisir Selatan 90% berasal dari pusat. Hasil capaian di tahun 2021 sebesar 65,28 - lebih tinggi dari target, disebabkan banyaknya kejadian bencana alam dan pandemik Covid-19, sehingga menyebabkan banyaknya bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Target capaian untuk tahun 2022 tidak dilakukan rasionalisasi.

23. Pencapaian skor pola pangan harapan

Nilai Pencapaian skor pola pangan harapan pada tahun 2019 telah cukup baik dengan nilai 86,4. Namun akibat dari pandemi covid 19 angka tersebut turun secara signifikan di tahun 2020 menjadi 81,7. Hal ini akibat dari dampak Covid 19 menyebabkan jumlah asupan kalori makanan masyarakat dibawah standar normal. Juga dipengaruhi rendahnya daya beli masyarakat, naiknya harga pangan, akses pangan yang terbatas, banyaknya pengangguran, dan terjadi pengurangan pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan rasionalisasi IKU RPJM pada indikator pencapaian skor pola pangan harapan; tahun 2023 menjadi 82, tahun 2024 menjadi 84, tahun 2025 menjadi 85 dan pada tahun 2026 menjadi 87.

26. Nilai investasi swasta dan masyarakat

Capaian investasi swasta dan masyarakat di tahun 2021 sangat besar dibandingkan dengan target, karena merupakan akumulasi dari jumlah investasi di tahun sebelumnya pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan OSS. Jenis investasi yang dilaporkan adalah semua besaran investasi, dengan nilai ≥ 5 milyar rupiah dan dibawah 5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan.

Di sisi lain, Kementerian investasi juga melakukan pendataan terhadap besaran investasi di daerah, namun nilai investasi yang direkap hanya dengan nilai ≥ 5 milyar rupiah, di luar aset tanah dan bangunan.

Jadi dalam rangka rasionalisasi indikator IKU Nilai investasi swasta dan masyarakat, DPMPTSP menyediakan dua macam data; versi LKPM/OSS dan versi Kementerian Investasi, sebagai berikut:

- a. Target nilai investasi swasta dan masyarakat versi LKPM/OSS: 2022 sebesar 1,95 T, 2023 sebesar 2,1 T, 2024 sebesar 2,3 T, 2025 sebesar 2,5 T, dan tahun 2026 sebesar 2,75 T.
- b. Target nilai investasi swasta dan masyarakat versi Kementerian Investasi: tahun 2022 sebesar 556 M, tahun 2023 sebesar 584 M, Tahun 2024 sebesar 613 M, tahun 2025 sebesar 644 M, dan tahun 2026 sebesar 676 M.

30. Rasio Konektivitas

Setelah melakukan pengambilan data ulang maka dilakukan perubahan nilai perhitungan dan perubahan target menjadi sebagai berikut; tahun 2022 menjadi 0.51, tahun 2023 menjadi 0.53, tahun 2024 menjadi 0.55, tahun 2025 menjadi 0.57 dan pada tahun 2026 menjadi 0.59.

31. Persentase jalan kabupaten kondisi baik

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas PUTR terdapat perbaikan data hasil capaian di tahun 2021 dari target 29,55 menjadi 41,73. Meningkatnya hasil target capaian ini disebabkan oleh besarnya alokasi pendanaan untuk kegiatan pemeliharaan jalan. Alokasi dana tersebut berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD, dana PHJD (Program Hibah Jalan Daerah), dan dari DAU. Sampai dengan tahun 2023 kegiatan peningkatan jalan kabupaten masih menjadi prioritas PUTR. Pada tahun 2023 pemerintah pusat melalui DAU mengalokasikan dana cukup besar untuk kegiatan PUTR. Besarnya alokasi dana untuk PUTR diharapkan bisa mengungkit angka Persentase jalan kabupaten kondisi baik. Dengan kondisi tersebut maka PUTR melakukan rasionalisasi IKU RPJM pada indikator persentase jalan kabupaten kondisi baik menjadi sebagai berikut; tahun 2022 menjadi 44.22, tahun 2023 menjadi 45, tahun 2024 menjadi 46, tahun 2025 menjadi 47 dan pada tahun 2026 menjadi 48.

33. Indek kualitas lingkungan hidup

Rendahnya capaian tahun 2021 disebabkan adanya perubahan formulasi perhitungan Indek kualitas lingkungan hidup. Perubahan formulasi ini menyebabkan penurunan angka Indek kualitas lingkungan hidup. Untuk target ditahun 2023 hingga tahun 2026, dinas Perkimtan LH melakukan penyesuaian target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Berdasarkan surat edaran ini maka target dinas perkimtan LH menjadi sebagai berikut; tahun 2022 menjadi 72.45, tahun 2023 menjadi 72.76, tahun 2024 menjadi 73.07, tahun 2025 menjadi 73.38 dan pada tahun 2026 menjadi 73.69.

35. Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah capaian target di tahun 2021 bukanlah angka sebenarnya, data yang diambil hanya dari beberapa objek wisata yang berbayar. Sehingga untuk perhitungan kedepannya akan ditambahkan dengan pendataan dari objek wisata berbayar. Objek wisata berbayar tersebut meliputi data kunjungan di Carocok, Pulau Setan, Jembatan Akar, Sumedang, Sako, dll (63 Objek wisata), dan tidak berbayar dari POKDARWIS. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan rasionalisasi jumlah kunjungan untuk tahun 2023

menjadi 1.320.000, tahun 2024 menjadi 1.500.000, tahun 2025 menjadi 1.650.000 dan pada tahun 2026 menjadi 1.700.000.

37. Jumlah omset usaha ekonomi kreatif

Dari 18 total jenis ekonomi kreatif terdapat 7 diantaranya beradadi Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan rasionalisasi nilai IKU RPJMD jumlah omset usaha ekonomi kreatif untuk tahun 2023 menjadi 20 MILYAR, tahun 2024 menjadi 25 MILYAR, tahun 2025 menjadi 30 MILYAR dan pada tahun 2026 menjadi 35 MILYAR.

38. Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan

Pasca diterbitkannya PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan, terjadi perubahan indikator persentase pemenuhan 8 standar pendidikan menjadi 3 indikator standar nasional pendidikan, yakni Indeks Literasi, Indeks Numerasi, dan Indeks Karakter. Oleh karena itu indikator kinerja utama pendidikan di RPJMD, diubah dengan memuat ke tiga indikator tersebut. Adapun penyesuaian target untuk masing masing indikator tersebut adalah sebagai berikut; **indeks Literasi** untuk tahun 2023 adalah 1.80, tahun 2024 adalah 1.90, tahun 2025 adalah 2.00, dan pada tahun 2026 adalah 2.10. Untuk **Indeks Numerasi** untuk tahun 2023 adalah 1.70, tahun 2024 adalah 1.80, tahun 2025 adalah 1.90, dan pada tahun 2026 adalah 2.00. Sedangkan untuk **Indeks Karakter** untuk tahun 2023 adalah 2.12, tahun 2024 adalah 2.13, tahun 2025 adalah 2.14, dan pada tahun 2026 adalah 2.15. Saat ini posisi Rapor Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat provinsi berada 2 terbawah sesudah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

43. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Angka capaian tahun 2021 yang sama dengan angka target 2021 bukanlah angka sebenarnya dimana capaian telah mencapai target 2021. Untuk pencapaian target tahun selanjutnya dinas Perpustakaan dan Arsip tidak berani memberikan target baru. Hal ini disebabkan dikarenakan kecilnya porsi penganggaran OPD.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Ada 7 variabel yang dinilai untuk menghasilkan nilai IPLM:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat/hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

7. Anggota perpustakaan

Range nilai IPLM: $\leq 10,92$ kurang, $10,93-12,99$ cukup, $13,00-14,72$ baik, dan $\geq 14,73$ sangat baik.

46. Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Nilai indikator stagnan oleh karena itu dilakukan rasionalisasi target capaian nilai IKU Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional untuk tahun 2023 menjadi 14 ORANG, tahun 2024 menjadi 18 ORANG, tahun 2025 menjadi 20 ORANG dan pada tahun 2026 menjadi 26 ORANG. Peningkatan target ini didasarkan kepada banyaknya even olah raga ditahun tahun kedepan seperti Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV).

51. Jumlah nagari Tangguh bencana

Pada tahun 2016-2017 telah terbentuk KSB (Kelompok Siaga Bencana) sebanyak 182 nagari pada posisi pratama. Namun sampai dengan tahun 2021, KSB tersebut sudah tidak aktif. Berdasarkan data tahun 2022, tinggal 45 nagari yang berstatus nagari tangguh bencana (pratama). Oleh sebab itu BPBD melakukan rasionalisasi jumlah nagari tangguh bencana untuk tahun 2023 menjadi 67 nagari masuk dalam kategori pratama, tahun 2024 menjadi 87 nagari masuk dalam kategori pratama, tahun 2025 menjadi 107 nagari masuk dalam kategori pratama dan pada tahun 2026 menjadi 127 nagari masuk dalam kategori pratama.